

# **PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) PADA INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Pada Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

|                      |          |                              |
|----------------------|----------|------------------------------|
| <b>NAMA</b>          | <b>:</b> | <b>ANJLIA D. NASUTION</b>    |
| <b>NPM</b>           | <b>:</b> | <b>2005170103</b>            |
| <b>PROGRAM STUDI</b> | <b>:</b> | <b>AKUNTANSI</b>             |
| <b>KONSENTRASI</b>   | <b>:</b> | <b>AKUNTANSI PEMERIKSAAN</b> |

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam selangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan menyimpulkan:

**MEMUTUSKAN**

Nama : ANSLIA D. NASUTION  
N.P.M : 2805170103  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN  
Judul Skripsi : PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) PADA INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (A) *Lulus Tugastium* dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Penguji II

(Novi Fadhila, S.E., M.M)

Pembimbing

(Henny Zurika Lubis, S.E., M.Si)

**PANITIA UJIAN**

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si, CMA)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)





**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Tugas Akhir ini disusun oleh:

|                       |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Mahasiswa        | : Anjlia D. Nasution                                                                                                                                                  |
| NPM                   | : 2005170103                                                                                                                                                          |
| Program Studi         | : Akuntansi                                                                                                                                                           |
| Konsentrasi           | : Akuntansi Pemeriksaan                                                                                                                                               |
| Nama Dosen Pembimbing | : Henny Zurika Lubis.,SE.M.Si                                                                                                                                         |
| Judul                 | : Pengaruh Pengendalian Internal, Good Corporate Governance dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara |

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan tugas akhir.

Medan,

Pembimbing Tugas Akhir

(HENNY ZURIKA LUBIS S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

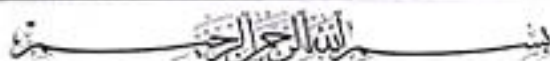
(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM S.E., M.Si)



Dekan

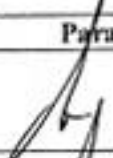
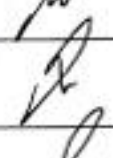
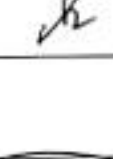
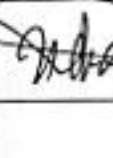
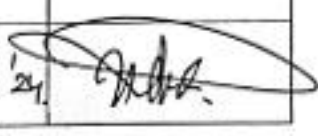
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. H. JANURI S.E., M.M., M.Si, CMA)



**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : Anjlia D. Nasution  
NPM : 2005170103  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan  
Nama Dosen Pembimbing : Henny Zurika Lubis, SE, M.Si  
Judul : Pengaruh Pengendalian Internal, Good Corporate Governance dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

| Item                          | Hasil Evaluasi                                                                            | Tanggal  | Paraf                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I                         | - Latar Belakang tambahkan Data pendukung Masalah probasi.<br>- Kerangka Masalah probasi. | 2/12/24  |  |
| BAB II                        | - Teori dan Bukti ditambh.<br>- Kerangka Konseptual Probasi                               |          |  |
| BAB III                       | - Populasi dan Sampel Jelaskan Masalah yg diteliti.<br>- Teknik Analisis Data.            | 9/12/24  |  |
| BAB IV                        | - Deskripsi Data, Buatlah grafik / Diagram.<br>- Pembahasan probasi                       | 11/12/24 |  |
| BAB V                         | - Kesimpulan dan Saran<br>- Abstrak dibuat                                                |          |  |
| Daftar Pustaka                | - Sumber Mendukung.                                                                       |          |                                                                                       |
| Persetujuan Sidang Meja Hijau | - Acc. Sidang Meja Hijau                                                                  | 11/01/24 |  |

Medan,

Diketahui Oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM SE, M.Si

Disetujui Oleh:  
Dosen Pembimbing

HENNY ZURIKA LUBIS SE, M.Si

## **ABSTRAK**

### **Pengaruh Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara**

**Anjlia D. Nasution**

Program Studi Akuntansi

Email: [anjlianasution@gmail.com](mailto:anjlianasution@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengendalian internal, *good corporate governance* dan *whistleblowing system* sebagai variabel independent, pencegahan kecurangan (*fraud*) sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang diperoleh dengan membagikan kuesioner langsung kepada responden sebanyak 41 kuesioner. Analisis data menggunakan Partial Least Square dengan software SmartPLS 4.0, meliputi outer model test, inner model test, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan *good corporate governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada auditor di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, sedangkan untuk *whistleblowing system* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada auditor di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

**Kata kunci: Pencegahan *Fraud*, Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing System*.**

## **ABSTRACT**

### **The Effect of Internal Control, Good Corporate Governance and Whistleblowing System on Fraud Prevention at the Inspectorate of North Sumatra Province**

**Anjlia D. Nasution**  
**Accounting Study Program**  
**Email: [anjlianasution@gmail.com](mailto:anjlianasution@gmail.com)**

This study aims to: test and analyze the factors that influence fraud prevention. The variables used in this study use internal control, good corporate governance and whistleblowing system as independent variables, fraud prevention as the dependent variable. The population in this study were employees who worked at the Inspectorate of North Sumatra Province. This study uses the simple random sampling method. The data used in this study are primary data. The data obtained by distributing questionnaires directly to respondents totaling 41 questionnaires. Data analysis using Partial Least Square with SmartPLS 4.0 software, including outer model test, inner model test, and hypothesis testing. The results of this study indicate that internal control and good corporate governance have a positive and significant effect on fraud prevention in auditors at the Inspectorate of North Sumatra Province, while the whistleblowing system has no significant effect on fraud prevention in auditors at the Inspectorate of North Sumatra Province.

***Keywords: Fraud Prevention, Internal Control, Good Corporate Governance and Whistleblowing System.***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan rasa syukur ke hadirat Allah SWT karena berkah, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Pengaruh Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara” merupakan persyaratan akademik untuk menyelesaikan Program Sarjana S-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada Allah SWT, karena dengan izin dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Kepada kedua orangtua untuk semua Doa, semangat dan semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Serta saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani M,AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. H. Januri S.E., MM., M.Si., CMA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E.,M.Si**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara.

5. Bapak **Riva Ubar Harahap S.E., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Henny Zurika Lubis, SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf pegawai biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada Liza Haryati, Rizka Anggraini dan Devi Liani Anisya selaku teman yang selalu mendukung dan memberi semangat untuk mengerjakan perjalanan penulisan Tugas Akhir ini.
9. Seluruh teman-teman kelas Akuntansi Stambuk 2020 dan teman-teman yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini belum sempurna, baik penulisan maupun isi karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Amin YaRabbal'alamin.

Medan, Oktober 2024

**Anjlia D Nasution**  
**2005170103**

## DAFTAR ISI

|                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ABSTRAK .....                                                                          | 5    |
| ABSTRACT .....                                                                         | 6    |
| KATA PENGANTAR .....                                                                   | ii   |
| DAFTAR ISI .....                                                                       | iv   |
| DAFTAR TABEL .....                                                                     | vi   |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                    | vii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                                  | viii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                | 1    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                                                       | 1    |
| 1.2 Identifikasi Masalah .....                                                         | 8    |
| 1.3 Rumusan Masalah .....                                                              | 9    |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....                                                            | 9    |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                                                           | 10   |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA .....                                                            | 11   |
| 2.1 Landasan Teori .....                                                               | 11   |
| 2.1.1 Pencegahan Kecurangan ( <i>Fraud</i> ) .....                                     | 11   |
| 2.1.2 Pengendalian Internal ( <i>Internal Control</i> ) .....                          | 17   |
| 2.1.3 <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....                                     | 22   |
| 2.1.4 <i>Whistleblowing System</i> .....                                               | 25   |
| 2.2 Penelitian Terdahulu .....                                                         | 36   |
| 2.3 Kerangka Konseptual .....                                                          | 38   |
| 2.3.1 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .....            | 38   |
| 2.3.2 Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> ..... | 39   |
| 2.3.3 Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .....     | 40   |
| 2.4 Hipotesis .....                                                                    | 41   |
| BAB III METODE PENELITIAN .....                                                        | 42   |
| 3.1 Jenis Penelitian .....                                                             | 42   |
| 3.2 Definisi Operasional Variabel .....                                                | 42   |
| 3.2.1 Variabel Bebas/Variabel Independen (X) .....                                     | 43   |
| 3.2.2 Variabel Terikat (Y) .....                                                       | 43   |
| 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....                                                  | 44   |
| 3.3.1 Tempat Penelitian .....                                                          | 44   |

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.2 Waktu Penelitian .....                                                       | 45 |
| 3.4 Teknik Pengambilan Sampel .....                                                | 45 |
| 3.4.1 Populasi .....                                                               | 45 |
| 3.4.2 Sampel Penelitian .....                                                      | 46 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....                                                  | 47 |
| 3.5.1 Uji Validitas.....                                                           | 48 |
| 3.5.2 Uji Reliabilitas .....                                                       | 51 |
| 3.6 Teknik Analisis Data .....                                                     | 52 |
| 3.6.1 Analisa Model Pengukuran (Outer Model) .....                                 | 54 |
| 3.6.2 Analisa Model Struktural (Inner Model) .....                                 | 55 |
| 3.6.3 Uji Hipotesis.....                                                           | 57 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN .....                                                      | 58 |
| 4.1 Deskripsi Data .....                                                           | 58 |
| 4.1.1 Karakteristik Responden .....                                                | 58 |
| 4.2 Analisis Data .....                                                            | 60 |
| 4.2.1 Analisis Model Pengukuran (Outer Model).....                                 | 60 |
| 4.2.2 Analisis Model Struktural (Inner Model).....                                 | 64 |
| 4.2.3 Uji Hipotesis.....                                                           | 66 |
| 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....                                              | 68 |
| 4.3.1 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan .....          | 68 |
| 4.3.2 Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Pencegahan Kecurangan ... | 69 |
| 4.3.3 Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> ..... | 70 |
| BAB V PENUTUP .....                                                                | 72 |
| 5.1 Kesimpulan.....                                                                | 72 |
| 5.2 Saran .....                                                                    | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                               | 74 |

## DAFTAR TABEL

|             |                                                                                  |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1   | Score CPI Indonesia dari Tahun 2018-2023.....                                    | 1  |
| Tabel 1.2   | LHP Pemetaan Kasus Korupsi Provinsi Sumatera Utara.....                          | 4  |
| Tabel 2.1   | Penelitian Terdahulu.....                                                        | 35 |
| Tabel 3.2   | Defenisi Operasional variabel.....                                               | 43 |
| Tabel 3.3   | Rencana Jadwal Penelitian.....                                                   | 44 |
| Tabel 3.4   | Populasi Auditor Internal Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun<br>2024..... | 45 |
| Tabel 3.5   | Skala Likert.....                                                                | 46 |
| Tabel 3.6   | Pengujian Validitas berdasarkan Loading Faktor.....                              | 50 |
| Tabel 3.7   | Pengujian Validitas Berdasarkan Average Variance Extracted(AVE).....             | 50 |
| Tabel 3.8   | Composite Reliability dan Cronbach's Alpha.....                                  | 51 |
| Tabel 4.1.1 | Jenis Kelamin Responden pada Inspektorat Provinsi Sumatra Utara.....             | 58 |
| Tabel 4.1.2 | Usia Responden pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.....                     | 58 |
| Tabel 4.1.3 | Jenjang Pendidikan Responden Pada Inspektorat Provinsi Sumatera<br>Utara.....    | 59 |
| Tabel 4.2.1 | Pengujian Validitas berdasar Average Variance Extracted /AVE.....                | 61 |
| Tabel 4.2.2 | Pengujian Validitas Diskriminan.....                                             | 62 |
| Tabel 4.2.3 | Composite Reliability dan Cronbach's Alpha.....                                  | 63 |
| Tabel 4.2.4 | Nilai Koefisien Determinasi (R-Square).....                                      | 64 |
| Tabel 4.2.5 | Nilai F-Square.....                                                              | 65 |
| Tabel 4.2.6 | Pengujian Signifikan Pengaruh Langsung.....                                      | 67 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka berpikir konseptual..... | 39 |
| Gambar 4.2.1 Outer Loading.....              | 62 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|             |                                      |    |
|-------------|--------------------------------------|----|
| Lampiran 1  | Kuesioner Penelitian.....            | 77 |
| Lampiran 2  | Tabulasi Data Mentah.....            | 84 |
| Lampiran 3  | Lembar Persetujuan.....              | 85 |
| Lampiran 4  | SK Dosen Pembimbing.....             | 86 |
| Lampiran 5  | Izin Riset dan Balasan.....          | 87 |
| Lampiran 6  | Selesai Riset dan Balasan.....       | 89 |
| Lampiran 7  | Pernyataan Keaslian Skripsi.....     | 91 |
| Lampiran 8  | Berita Acara Bimbingan Proposal..... | 92 |
| Lampiran 9  | Berita Acara Seminar.....            | 93 |
| Lampiran 10 | Daftar Riwayat Hidup.....            | 94 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kecurangan (*Fraud*) adalah seseorang atau kelompok yang melakukan kecurangan yang menyadari bahwa tindakan mereka dapat menghasilkan keuntungan negatif bagi pihak atau individu lain. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), ada tiga jenis penipuan yaitu: Penyalahgunaan Aset, yaitu penyalahgunaan dan pencurian aset perusahaan atau aset pihak ketiga. Kedua, pernyataan palsu dan ketiga korupsi, yaitu penipuan yang sangat sulit dihilangkan karena memerlukan kerjasama antar pihak dan saling menguntungkan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter terhadap 239 responden menunjukkan bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi.

Pada tanggal 30 Januari 2024, Transparency International meluncurkan *Corruption Perception Index* (CPI) untuk tahun 2023. Untuk mengukur persepsi korupsi, TI melakukan survei komprehensif di 180 negara, dengan sasaran para profesional dan pakar bisnis. Hasil survei disajikan dalam bentuk skor dengan skala 1 hingga 100, dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan persepsi yang lebih bersih terhadap suatu negara dalam hal korupsi. Sebaliknya, skor yang lebih rendah menunjukkan persepsi tingkat korupsi yang lebih tinggi.

**Tabel 1. 1**  
**Score CPI Indonesia dari Tahun 2018-2023**

| Tahun | Score CPI | Peringkat |
|-------|-----------|-----------|
| 2018  | 38        | 89        |
| 2019  | 40        | 85        |
| 2020  | 37        | 102       |
| 2021  | 38        | 98        |
| 2022  | 34        | 110       |

|      |    |     |
|------|----|-----|
| 2023 | 34 | 115 |
|------|----|-----|

Sumber: <https://www.ti.or.id> (2024).

Pada CPI 2023, Indonesia mendapat skor 34/100 dan menempati posisi 115 dari 180 negara yang disurvei. Hebatnya, skor 34/100 ini tetap konsisten dengan skor CPI tahun 2022. ACFE melakukan analisis komprehensif terhadap 1.921 kasus dari 138 negara dan wilayah, sebagaimana dalam *Report to the Nations* tahun 2023. Total kerugian moneter akibat kasus penipuan yang dilaporkan ini melampaui \$3,1 miliar. (Sumber: Sustain.id, Februari 2024).

Data *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun selama 10 tahun terakhir (2013-2022). (Sumber: Pusat Edukasi Antikorupsi Aksi Informasi, Februari 2024). Akibat dari korupsi yang dapat kita rasakan tentunya tidak terciptanya tata pemerintahan yang mengarah pada *good corporate governance* (GCG). Korupsi mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik karena adanya politik uang, korupsi mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik, korupsi meniadakan sistem promosi dan hukuman, korupsi menyebabkan kolapsnya sistem perekonomian karena produk tidak kompetitif dan penumpukan beban utang luar negeri. (Thahir & Tajib, 2023). Sebagai auditor internal pemerintah, inspektorat diuntut untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

ICW berhasil mengidentifikasi sebanyak 24 latar belakang profesi yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Hasil klasifikasi berdasarkan status kepegawaian, dari total 1.695 tersangka, hanya sekitar 38% yang berstatus ASN, 61,8% bukan ASN, dan 0,2% sisanya merupakan badan hukum korporasi. Dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 yang dipantau oleh ICW, Provinsi Sumatera Utara mendapat urutan kedelapan

dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia dengan total 19 kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp.37,1 miliar dengan kerugian suap dan pungli mencapai Rp. 1,14 miliar. Namun pada tahun 2023, Provinsi Sumatera Utara mendapat urutan kedua dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia dengan 54 kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp.91,3 miliar dengan kerugian suap dan pungli mencapai Rp.699 juta. Sementara di urutan pertama adalah Jawa Timur selama dua tahun terakhir. Dalam konteks kerugian akibat suap dan pungli, pelaku seringkali terlibat dalam tindakan mempengaruhi keputusan dan kebijakan dengan ketidakseimbangan uang/barang. Ini merupakan bentuk *fraud* yang berwenang/kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Ini berarti masuk ke dalam kategori *fraud* penyalahgunaan aset/ penggelapan dan pembekuan aset. (Selengkapnya lihat di lampiran).

**Tabel 1.2**  
**LHP Pemetaan Kasus Korupsi Provinsi Sumatera Utara**

| Tahun | Urutan berdasarkan hasil pemetaan | Jumlah Kasus | Total kerugian korupsi | Kerugian suap dan pungli |
|-------|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| 2019  | 14 dari 32 provinsi               | 7            | Rp.18 miliar           | Rp.680 juta              |
| 2020  | 3 dari 32 provinsi                | 13           | Rp.24,5 miliar         | Rp.7,5 juta              |
| 2021  | 10 dari 35 provinsi               | 18           | Rp.168,1 miliar        | Rp.438 juta              |
| 2022  | 8 dari 38 provinsi                | 19           | Rp.37,1 miliar         | Rp.1,14 miliar           |
| 2023  | 2 dari 38 provinsi                | 54           | Rp.91,3 miliar         | Rp.699 juta              |

Sumber: <https://antikorupsi.org/sites/>

Dalam instansi pemerintah, pengendalian internal diperlukan sebagai langkah awal pencegahan terjadinya *fraud*. Namun dalam menjalankan tugasnya, inspektorat belum dapat menjalankan tugasnya secara maksimal, karena masih banyak temuan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdeteksi oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) khususnya di beberapa kota atau daerah. BPK-RI diamanatkan UU No.15./2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara untuk melakukan audit atas LKPD. Pemeriksaan oleh

BPK-RI tidak hanya menghasilkan opini atas laporan keuangan dan laporan keuangan yang diaudit tetapi juga memberikan catatan hasil temuan. Temuan tersebut menjelaskan kelemahan pengendalian internal dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil audit juga memberikan informasi potensi kerugian negara yang ditemukan dalam proses audit akibat dari penyalahgunaan dan in-efisiensi penggunaan APBN/APBD. Beberapa hasil audit BPK-RI tersebut ditindaklanjuti menjadi audit investigasi, kasus korupsi dan kasus pidana.

Inspektorat yang bertindak sebagai auditor internal pemerintah atau yang biasa dikenal dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berfungsi sebagai pimpinan internal pemerintah untuk mencegah terjadinya *fraud* di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, salah satu fungsi APIP terkait Inspektorat provinsi/kabupaten/kota adalah mengkaji laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebelum diaudit oleh BPK.

Penelitian ini didukung karena ditemukan adanya kasus-kasus yang terjadi di Inspektorat seperti yang ada pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara. BPK RI mengatakan pihaknya masih menemukan beberapa temuan dalam pengelolaan keuangan Pemprov Sumut. Temuan tersebut yakni 5 temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian internal, dan 10 temuan pemeriksaan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian internal, antara lain, penata usahaan asset tetap masih belum memadai, pengelolaan dana bos tidak memadai, dan kekurangan volume pekerjaan atas belanja modal pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Dinas. (Lubis et al., 2024)

Pada bulan oktober 2023, BPK RI Perwakilan Sumatera Utara menemukan 9 temuan terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Sumut, termasuk indikasi korupsi pada empat SKPD dengan nilai mencapai Rp400 juta. Pemeriksaan menunjukkan belanja pemeliharaan sebesar Rp163,79 miliar (56,61% dari anggaran Rp289,35 juta. Temuan utama terjadi di Sekretariat Daerah Sumut, termasuk selisih pembayaran pemeliharaan komputer sebesar Rp70,6 juta, kelebihan pembayaran untuk pemeliharaan lift dan trafo listrik senilai Rp.16,3 juta, serta pekerjaan portal/barrier gate yang tidak dilaksanakan bernilai Rp.6 juta. BPK juga mengungkap ketidaktertiban administrasi, seperti pesanan lisan, PPTK yang tidak mengetahui detail pekerjaan, dan kontrak tanpa rincian pekerjaan. Inspektorat Sumut dan Sekda Sumut belum memberikan tanggapan resmi. (<https://www.lintas10.com/>).

Dugaan korupsi senilai Rp804,9 juta terkait pengadaan barang dan jasa E-Purchasing Inspektorat Tebing Tinggi Tahun 2023 mencuat. LBH Benri Saragih menemukan 13 kegiatan fiktif, termasuk pengadaan kendaraan dengan nomor polisi mirip (BK 1303 N dan BK 1303 NT). Dugaan korupsi ini menambah daftar pelanggaran di lingkungan Pemkot Tebing Tinggi, setelah sebelumnya ditemukan indikasi serupa di Dinas Kesehatan, Kesra, dan Dinas Pendidikan. Kasus ini menambah dugaan korupsi di OPD Tebing Tinggi, menarik perhatian Polda Sumut dan Kejati Sumut untuk penyelidikan lebih lanjut. (<https://sumutpost.id/>).

Pengendalian internal merupakan faktor penting yang mempengaruhi pencegahan kecurangan/*fraud*. Pengendalian internal adalah upaya yang mencakup kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan/organisasi dari kredensial, memastikan keakuratan informasi akuntansi yang tersedia, serta

menjamin bahwa seluruh karyawan mematuhi dan menegakkan peraturan atau undang-undang yang berlaku (Lubis et al., 2024). Pengendalian internal merupakan serangkaian proses yang berkaitan dengan prosedur-prosedur yang harus ditaati dalam kegiatan operasional organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka mengendalikan perilaku anggota organisasi agar proses operasional organisasi berjalan secara efektif dan efisien, dibuatlah peraturan organisasi. Peraturan tersebut harus dipatuhi oleh semua pegawai. Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan dikenai sanksi, dengan tujuan agar di masa mendatang pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi, baik oleh pegawai yang melakukan pelanggaran sebelumnya maupun pegawai yang belum pernah melakukan pelanggaran. Jika dalam organisasi terdapat pengendalian internal yang baik, perilaku menyimpang seperti kecurangan yang mungkin terjadi dalam organisasi dapat diminimalkan. Pengendalian internal memegang peranan penting dalam suatu organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan akuntansi. Pengendalian internal yang lemah menyebabkan kecurangan yang tidak terdeteksi dalam proses akuntansi, menjadikan bukti audit dari data akuntansi tidak kompeten. (Akhtar et al., 2022). Jika perusahaan/organisasi telah menerapkan pengendalian internal, maka akan mendorong perusahaan/organisasi berjalan secara efektif dan kompeten serta memperkecil ruang terjadinya tindak kecurangan. (Lubis et al., 2024). Ini berarti, sistem pengendalian internal sangat mempengaruhi tingkat kecurangan yang terdapat didalam suatu perusahaan atau institusi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho & Afifi, 2022), (Destiyana et al., 2024) dan (Kusumoaji & Aris, 2023).

Selain itu, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2004:3)

menjelaskan bahwa penerapan sistem *whistleblowing* merupakan bentuk implementasi nyata dari *Good Corporate Governance* (GCG) dalam prinsip keterbukaan (*transparency*). GCG diciptakan sebagai proses untuk memaksimalkan produktifitas, memberikan perlindungan, dan memberikan pengawasan agar tingkat kepatuhan terhadap aturan, hukum, dan standar etika yang berlaku umum berlaku dengan baik. Penerapan kebijakan *Good Corporate Governance* merupakan hal penting yang perlu diterapkan di perusahaan, karena dengan penerapan kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang baik. (Wahyudi, 2014) dalam (Hafsah & Harahap, 2021). *Good corporate governance* yang berfungsi dengan baik dapat membantu mencegah kecurangan, mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan (Sari et al., 2018) dalam (Harmana, 2023). GCG merupakan kode etik yang diterapkan organisasi guna terhindar dari kejahatan yang melanggar hukum. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan akan meningkat dengan diterapkannya prinsip GCG. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas maka dapat mempersempit peluang *fraud* akan terjadi (Soleman, 2013) dalam (Lestari et al., 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lubis et al., 2024), (Rahmadani & Sugiarto, 2023) dan (Naufal, 2023).

Selain GCG dan pengendalian internal, yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindakan kecurangan adalah dengan melakukan tindakan *whistleblowing* (meniup peluit). Georgiana (2011) dalam (Hafsah & Harahap, 2021) mendefinisikan *whistleblower* sebagai seorang yang mengungkapkan kepada publik atau seseorang yang memiliki otoritas mengenai aktivitas ilegal atau tidak jujur yang terjadi pada departemen pemerintah, organisasi publik, organisasi privat, atau perusahaan.

Kehadiran dari *whistleblowing* di sebuah organisasi sangat penting. Namun, akibat belum optimalnya sistem yang dibuat dan bergantung pada kebijakan di setiap lembaga, pelaksanaan *whistleblowing* di lembaga keuangan masih memiliki kendala. Dengan kata lain, penerapan sistem serta belum optimalnya jaringan membuat sistem di lembaga keuangan masih rentan. Demikian juga masalah kerahasiaan dan keamanan, tidak hanya melindungi seseorang agar bersedia menjadi pelapor, tetapi harus dipastikan adanya tindak lanjut penelusuran investigasi dan pengungkapan laporan secara memadai, profesional, dan independen. Harus diingat bahwa kekuatan *whistleblowing* akan bergantung pada *whistleblower*, partisipasi dari *whistleblower* sangat penting untuk efektifitas *whistleblowing*. Karena sistem ini akan menjadi tidak berguna apabila tidak ada yang menggunakannya untuk melaporkan tindakan penipuan apapun (Iskandar & Saragih, 2018). Siapa pun yang mengetahui adanya pelanggaran dalam suatu organisasi dapat menggunakan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) untuk melaporkannya. Mekanisme yang efektif untuk melaporkan pelanggaran dapat mengurangi terjadinya penipuan (Destiyana et al., 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Melinda et al., 2023), (Hasanah et al., 2023) dan (Priandini & Biduri, 2023).

Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang

akan diteliti untuk penelitian ini adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu:

1. Adanya LHP Tren Penindakan Kasus Korupsi yang dipantau oleh ICW pada tahun 2022 sampai 2023 yaitu Provinsi Sumatera Utara mendapat urutan dari urutan kedelapan menjadi urutan kedua dari 38 provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2023.
2. Adanya indikasi *fraud* yang ditemukan di beberapa Inspektorat karena auditor Inspektorat masih lambat dan kurang termotivasi dalam menuntaskan dugaan kasus-kasus korupsi di wilayah binaannya.
3. Masih kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh karyawan dalam menerapkan *whistleblowing system*, sehingga sebagian besar karyawan masih enggan untuk melaporkan pelanggaran yang diketahuinya.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dapat diperoleh melalui pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi informasi serta memperluas wawasan mengenai Audit Internal, Pengendalian Internal dan Kualitas Audit terhadap pencegahan Kecurangan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjad masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian selanjutnya.

#### **3. Manfaat Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Landasan teori adalah suatu konsep dengan penjelasan sistematis yang jelas yang memiliki variabel dalam penelitian karena landasan teori merupakan landasan yang kuat untuk penelitian yang sedang berlangsung.

##### **2.1.1 Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)**

###### **A. Pengertian Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)**

Tjahjono dalam (Kusumoaji & Aris, 2023) menjelaskan *fraud* adalah kegiatan ilegal yang secara sengaja untuk menipu orang lain yang mengakibatkan kerugian dan keuntungan bagi pelaku. Menurut Sawyer's (2004), *fraud* adalah tindakan pelanggaran hukum yang dicirikan penipuan, menyembunyikan dan melanggar kepercayaan.

Kecurangan (*Fraud*) adalah seseorang atau kelompok yang melakukan kecurangan yang menyadari bahwa Tindakan mereka dapat menghasilkan keuntungan negatif bagi pihak atau individu lain. (Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia, 2020).

Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tahun 2013, kecurangan atau *fraud* merupakan serangkaian ketidakberesan (irregularities) dan tindakan ilegal atau tindakan melawan hukum (*illegal act*) yang ditandai dengan tipu daya, menyembunyikan, dan pelanggaran kepercayaan. Tindakan kecurangan (*fraud*) ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik.

Kecurangan ini dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa; atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kecurangan (*fraud*) adalah serangkaian tindakan ilegal/ melawan hukum yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian, dan pelanggaran kepercayaan yang mengakibatkan kerugian dan keuntungan bagi pelaku.

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) terdapat faktor yang mempengaruhi terjadinya Fraud pada suatu perusahaan, antara lain:

1. Kebutuhan psikologis untuk hidup berlebihan dapat menjadi pemicu seseorang untuk melakukan tindak kecurangan dengan alasan keuangan.
2. Lingkungan yang mengundang terjadinya penggelapan seringkali terjadi dalam situasi tanpa adanya atau dengan adanya control intern yang lemah.
3. Karakteristik perilaku seseorang juga berperan penting, dimana kasus-kasus ekstrim dan kebutuhan berlebihan seperti yang disebutkan di atas, ditambah dengan lemahnya situasi kontrol dari faktor sebelumnya, dapat menggoyahkan moralitas seseorang untuk melakukan tindak kecurangan.

Jenis-Jenis *Fraud* menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) membagi Fraud kedalam tiga topologi atau biasa disebut sebagai Fraud Tree, adalah sebagai berikut:

a) Korupsi (*Corruption*)

Korupsi terbagi dalam empat bentuk yaitu konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*). *Conflict of interest* merupakan konflik yang muncul ketika seorang karyawan bertindak atas nama kepentingan pihak ketiga selama melakukan pekerjaannya atau atas nama kepentingan diri sendiri dalam kegiatan yang dilakukannya. Ketika *conflict of interest* karyawan tidak diketahui oleh perusahaan dan mengakibatkan kerugian keuangan, ini berarti telah terjadi *fraud*. *Bribery* merupakan penyuapan yang melibatkan pemberian, penawaran, permohonan, atau penerimaan sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi seseorang dalam melakukan pekerjaannya secara hukum. *Illegal gratuities* merupakan pemberian atau hadiah dalam bentuk terselubung dari penyuapan. Bentuk korupsi yang terakhir menurut ACFE adalah *economic extortion* yang merupakan penggunaan atau ancaman kekuatan termasuk sanksi ekonomi oleh individual atau organisasi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dan menguntungkan individu atau organisasi tersebut.

b) Penyalahgunaan Atas Asset (*Assets misappropriation*)

*Assets misappropriation* merupakan penyalahgunaan asset perusahaan dan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau negara. Transaksi yang melibatkan uang tunai, giro, persediaan, peralatan, dan informasi adalah hal yang paling rentan terhadap penyalahgunaan asset. Pada skema *asset misappropriation*, terdapat dua sub kategori yaitu kategori kas, dan persediaan dan asset lainnya. Skema kas mencakup pengembalian kas dari karyawan lainnya. Skema kas ini

mendominasi dalam kasus asset misappropriation. Didalam skema kas dibagi kedalam tiga kelompok, yakni: *larceny*, *skimming* dan *fraudulent disbursements*. *Larceny* merupakan pencurian kas setelah dicatat pada pembukuan perusahaan. *Skimming* merupakan pencurian uang tunai yang dilakukan sebelum pencatatan pembukuan perusahaan. Sedangkan *fraudulent disbursements* merupakan penyalahgunaan kas dimana arus uang sudah terekam dalam system perusahaan. Adapun pada skema persediaan dan asset lainnya, seorang karyawan dapat melakukan penggelapan uang dengan dua jalan yaitu penyalahgunaan (sebagai conroh peminjaman) atau dengan cara mencurinya.

c) Pernyataan Palsu atau Salah Pernyataan (*Fraudulent Statement*)

*Fraudulent Statement* merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan di sebuah perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan

## **B. Fraud Triangle Theory**

Menurut Tuanakotta (2011:105) bahwa *Fraud Triangle Theory* adalah suatu bentuk penggambaran model yang menggambarkan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan individu atau kelompok melakukan kecurangan. Konsep *Fraud Triangle Theory* pertama kali dijelaskan oleh Donald R.Cressey pada tahun 1953.

Konsep *fraud triangle* pertama kali dikemukakan oleh Donald R. Cressey. Cressey tertarik untuk mencari tahu mengapa seorang karyawan yang dipercayai melakukan *fraud*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menemukan bahwa seseorang melakukan *fraud* ketika mereka memiliki masalah keuangan yang serius

dan tidak bisa diselesaikan oleh orang lain, lalu mereka menyimpulkan bahwa mereka dapat secara diam-diam menyelesaikan masalah ini dengan melanggar kepercayaan yang diberikan pada mereka, dalam keadaan tersebut mereka mampu merasionalisasi perilaku mereka sedemikian rupa sehingga mereka mampu memunculkan pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang wajar. merupakan segitiga kecurangan yaitu adanya tiga kondisi kecurangan atau penyalahgunaan. Ketiga syarat tersebut adalah:

a. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan adalah dorongan dimana seseorang melakukan tindakan curang yang dapat disebabkan oleh tuntutan keuangan, pekerjaan dan gaya hidup. Menurut Albrecht, tekanan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu tekanan finansial, tekanan dari kebiasaan buruk serta tekanan pekerjaan.

b. Kesempatan (*Opportunity*)

*Fraud* dapat dilakukan ketika ada kesempatan untuk melakukannya. Peluang adalah kesempatan untuk melakukan kecurangan yang dihasilkan dari kurangnya kontrol. Menurut Albrecht, kurangnya pencegahan dan pengendalian *fraud*, lamanya mendeteksi *fraud*, kurangnya jejak audit serta minimnya sanksi terhadap pelaku kecurangan merupakan faktor yang dapat menciptakan peluang terjadinya *fraud*.

c. Rasionalisasi (*Rationalize*)

Rasionalisasi adalah pemikiran yang membenarkan kecurangan yang terjadi. Hampir semua kecurangan didasarkan pada rasionalisasi. Rasionalisasi adalah faktor dalam diri seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan kecurangan, tetapi pada akhirnya melakukannya. Rasionalisasi

adalah alasan pribadi yang dapat membenarkan suatu tindakan ketika tindakan tersebut sebenarnya tidak benar. Rasionalisasi terjadi ketika kecurangan dilakukan misalnya aset itu sebenarnya milik saya, saya hanya meminjam dan membayar kembali, tidak ada pihak yang dirugikan, itu dilakukan karena darurat. Sementara itu anti-fraud merupakan tindakan yang bertujuan guna mencegah terjadinya fraud. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kecurangan dengan memantau dan mengendalikan proses pelayanan publik, memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Taufik, 2019).

### **C. Indikator Pencegahan Kecurangan (Fraud)**

Menurut Tuanakotta (2007) pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Pengendalian internal yang aktif adalah cara terbaik untuk mencegah kecurangan. Adapun untuk mengukur pencegahan kecurangan digunakan indikator:

1. Membangun integritas.
2. Menciptakan kepemimpinan yang teladan.
3. Meminimumkan kesempatan.
4. Meminimumkan tekanan.
5. Mengembangkan sistem pengendalian internal yang baik.
6. Mengembangkan kebijakan dan sistem pencegahan kolusi.
7. Mengembangkan sistem monitoring, hotline dan *whistleblowing system*.
8. Mengembangkan sistem pemberian penghargaan dan hukuman.
9. Menciptakan keseimbangan kekuasaan.

## 2.1.2 Pengendalian Internal (*Internal Control*)

### A. Pengertian Pengendalian Internal (*Internal Control*)

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO, 2019) dalam (Hariyan et al., 2023) Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan mengenai pencapaian suatu tujuan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan, reabilitas pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan pengamanan asset dari penggunaan yang tidak sah. Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, operasi pengendalian, komunikasi, dan informasi pemantauan merupakan bagian penyusun pengendalian internal.

Menurut (Rustandy, et al., 2020) dalam (Eviliana, 2023) Pengendalian internal merupakan bagian dari organisasi, manajemen dan karyawan lain untuk menangani risiko bisnis dan risiko kecurangan yang mengancam pencapaian tujuan entitas, seperti pelaporan keuangan yang handal. Institut Akuntansi Publik Indonesia (IAPI) dalam bukunya "Standar Profesional Akuntan Publik" (2011:319.2) yang dikutip oleh (Sukrisno Agoes (2016:100) mendefenisikan pengendalian internal sebagai proses yang diterapkan komite entitas, manajemen, dan pihak lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tiga tujuan berikut:

- (a) keandalan pelaporan keuangan,
- (b) efektivitas dan efisiensi operasi,
- (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, direksi, manajemen dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar atas tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut pengendalian internal sifatnya dinamis, tidak hanya berada pada satu waktu saja, tetapi akan berada sepanjang proses berlangsungnya aktivitas operasi (Yayasan Pendidikan Internal Audit, 2015).

Dari beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengendalian Internal merupakan suatu sistem yang dibuat untuk menangani resiko bisnis dan risiko kecurangan, serta mencapai tujuan yang terkait dengan kegiatan operasi, pelaporan dan kepatuhan telah tercapai.

## **B. Tujuan Pengendalian Internal**

Hery (2016: 132) manajemen telah merancang sistem pengendalian yang efektif kedalam tiga tujuan umum yaitu:

### **1. Keandalan pelaporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditur, dan penggunaan lainnya. Tanggung jawab ini timbul. Mengingat bahwa pihak manajemen memiliki pengetahuan yang lebih terperinci dibandingkan dengan pihak auditor.

### **2. Efisiensi dan efektivitas operasi**

Manajemen bertanggung jawab untuk merancang dan menerapkan sistem pengendalian internal, serta melaporkan secara transparan perihal efektivitas pelaksanaan pengendalian. Sebaliknya auditor juga berkewajiban untuk menerbitkan laporan keuangan tentang penilaian manajemen atas

pengendalian internalnya, termasuk pendapat auditor mengenai keefektifan pelaksanaan pengendalian tersebut.

### 3. Ketaatan pada hukum dan peraturan

Berdasarkan undang-undang, manajemen dari semua perusahaan diharuskan untuk menerbitkan laporan pengendalian internal yang mencakup hal-hal: (a) suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan struktur pengendalian internal yang memadai serta prosedur pelaporan keuangan, (b) suatu penilaian atas efektivitas struktur pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan per akhir tahun buku perusahaan. Selain itu, manajemen harus menguji efektivitas pelaksanaan pengendalian untuk memastikan bahwa pengendalian telah diterapkan sebagaimana yang telah dirancang serta dilaksanakan oleh personel yang memiliki kewenangan dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan pengendalian tersebut secara efektif.

Tujuan utama pengendalian internal adalah agar suatu perusahaan dapat mencapai tujuan dengan mendapatkan kesempatan dan keuntungan serta mencegah adanya risiko kerugian dalam perusahaan (Sudarmanto, 2021). Sedangkan tujuan lainnya dari pengendalian internal adalah:

1. Menghasilkan informasi seperti laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan dan dipercaya.
2. Memastikan segala aktivitas perusahaan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Meningkatkan efisiensi dan mencegah adanya pemborosan pengelolaan sumber daya perusahaan.
4. Memastikan anggota perusahaan mengetahui dan mematuhi kebijakan

yang telah dibuat.

5. Menjaga asset perusahaan.
6. Menjamin keamanan operasional perusahaan.

Tuanakotta (2015: 94) tujuan pengendalian internal secara garis besar dapat dibagi menjadi empat kelompok yaitu:

- (1) Tujuan strategi, dengan sasaran-sasaran utama yang mendukung misi entitas.
- (2) Tujuan pelaporan keuangan, agar laporan keuangan bebas dari salah saji material tepat waktu dan tepat guna.
- (3) Tujuan operasional, dimana pengendalian mengamankan operasi entitas, yang dikenal sebagai operasional controls.
- (4) Tujuan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.

### **C. Indikator Pengendalian Internal (*Internal Control*)**

Menurut (COSO, 2013) Pengendalian internal terdiri atas lima komponen yang saling terkait yaitu:

#### **1. Lingkungan pengendalian (*Control Environment*)**

Berfungsi untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian dan sebagai dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup hal berikut:

- a. Integritas dan nilai etika,
- b. Komitmen terhadap kompetisi,
- c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit,

#### **2. Penilaian resiko (*Risk Assessment*)**

Tindakan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai untuk mencapai suatu tujuannya.

### 3. Aktivitas pengendalian (*Control Activities*)

Kebijakan dan prosedur yang membantu dan memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani resiko guna mencapai tujuan entitas. Aktivitas pengendalian dibagi menjadi lima jenis:

- a. Pemisahan tugas yang memadai,
- b. Otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas,
- c. Dokumen dan catatan yang memadai,
- d. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan,
- e. Pemeriksaan kinerja.

### 4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)

Untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas serta mempertahankan akuntabilitasnya. Komunikasi adalah proses terus menerus dan iteratif dalam menyediakan, berbagi, dan memperoleh informasi yang diperlukan. Informasi dan komunikasi memiliki 3 prinsip saling berkaitan, yaitu:

- 1) Memperoleh atau menghasilkan informasi berkualitas tinggi yang relevan untuk mendukung pengendalian internal.
- 2) Informasi komunikasi internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab diperlukan untuk mendorong komponen pengendalian internal lainnya.

- 3) Mengkomunikasikan masalah pengendalian internal yang relevan kepada pihak eksternal.

#### 5. Pemantauan (*Monitoring*)

Proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal dalam pencapaian tujuan entitasnya. Sistem pengendalian intern perlu ditinjau ulang karena banyak perubahan teknologi yang mempengaruhi adanya risiko. Oleh karena itu, pengawasan harus menjadi semacam operasi bisnis dan semacam kegiatan pengawasan. Platform pemantauan yang efektif meliputi:

- Memilih, penjabaran dan evaluasi unsur-unsur pengendalian intern secara bertahap atau mandiri.
- Mengevaluasi kekurangan dan mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab.

### 2.1.3 *Good Corporate Governance* (GCG)

#### A. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengatur, mengelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, serta mengawasi proses pengendalian usaha, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, dan masyarakat (Khoirunnisa et al., 2021).

Menurut (Cadbury, 1997) dalam (Irfan et al., 2023), *Good Corporate Governance* adalah asas pengarah dan pengendalian suatu perusahaan guna mencapai keseimbangan antara kekuatan dan wewenang perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada pemegang saham pada khususnya,

dan pemangku kepentingan pada umumnya. Menurut Fakhruddin (2014:36), *good corporate governance* dapat diartikan sebagai “Suatu sistem pengurusan dan pengawasan sebuah perusahaan (*the way a company directed and controlled*)”. Pengertian ini menyiratkan luasnya cakupan tata kelola perusahaan dan secara tidak langsung mengangkat isu tentang pentingnya komitmen dan kepemimpinan Board dalam implementasi GCG.

Suatu sistem peraturan yang mengatur hak dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk pemegang saham, kreditor, manajer, pekerja, dan pemerintah, dikenal dengan istilah tata kelola perusahaan yang baik (Kurniawan & Izzaty, 2019) dalam (Destiyana et al., 2023). Operasional suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk memastikan bahwa kepemimpinan dan manajemen perusahaan mempertimbangkan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan, pada akhirnya, peluang keberhasilan jangka panjang di pasar (Rahmadani & Sugiarto, 2023). Ada lima poin utama yang dibahas dalam tata kelola perusahaan: tugas dan kewajiban dewan direksi dan komisaris, perlakuan adil terhadap pemegang saham, keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perusahaan, dan hak pemegang saham/investor.

*Good Corporate Governance* merupakan kerangka kerja manajemen yang bertujuan memaksimalkan produktifitas, menjaga stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan standar etika yang berlaku umum (Wafi, 2020) dalam (Yanti & Hidayah, 2023).

Berdasarkan beberapa teori diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan prinsip-prinsip yang digunakan perusahaan dengan mengarahkan dan mengendalikan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya.

## **B. Prinsip *Good Corporate Governance***

Menurut Peraturan OJK tahun 2015 dalam (Kurniamaylani et al., 2023) menyatakan bahwa *good corporate governance* adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip berikut:

### **1) Prinsip Transparansi (*transparency*)**

Transparansi (*transparency*) mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.

### **2) Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)**

Akuntabilitas (*accountability*) dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat bertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Dewan komisaris dalam hal ini memberikan pengawasan terhadap bagi pemegang saham. Supaya prinsip akuntabilitas ini efektif, maka harus dijaga independensinya dari pengaruh manajemen.

### **3) Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*)**

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.

#### 4) Prinsip Independensi (professional)

Perusahaan menyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.

#### 5) Prinsip Kesenjangan atau kewajaran (*fairness*).

Kesenjangan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.

### 2.1.4 *Whistleblowing System*

#### A. Pengertian *Whistleblowing System*

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mendefinisikan *whistleblowing* sebagai pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang

dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*). Pengungkapan dilakukan dengan iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu (*grievance*) ataupun didasari kehendak buruk/*fitnah*.

*Whistleblowing system* adalah “suatu sistem pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan segala perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan” (Semendawai dkk. 2011:19) dalam (Melinda et al., 2023) *whistleblowing system* dapat dipergunakan oleh setiap organisasi atau perusahaan yang merupakan bagian dari program strategi anti-Fraud. Pada umumnya, seorang *whistleblower* akan melaporkan kejahatan di lingkungannya kepada otoritas internal terlebih dahulu.

Menurut (Hasanah et al., 2023) Jika Anda mencurigai adanya penipuan yang terjadi atau mungkin terjadi di dalam badan usaha atau pemerintah Anda, Anda dapat menggunakan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) untuk melaporkan atau mengajukan pengaduan. Sistem *whistleblower* tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kejadian penipuan, namun juga berfungsi sebagai sarana pengawasan. Karena sistem ini dapat diakses oleh semua karyawan, terdapat suasana ketakutan umum di kalangan pekerja untuk melakukan aktivitas penipuan karena takut akan pembalasan dari rekan kerja mereka (Mahdi & Darwis, 2020). Individu yang melakukan *whistleblowing* disebut sebagai *whistleblower*. (Georgiana, 2011) dalam Manafe (2016:115) mendefinisikan *whistleblower* sebagai seorang yang mengungkapkan kepada publik atau seseorang

yang memiliki otoritas mengenai aktivitas ilegal atau tidak jujur yang terjadi pada departemen pemerintah, organisasi publik, organisasi privat, atau perusahaan. Adapun aktivitas ilegal yang dimaksud ialah meliputi pelanggaran hukum, aturan, peraturan, dan/atau ancaman langsung terhadap kepentingan publik, misalnya fraud, ancaman keamanan/kesehatan, dan korupsi. *Whistleblower* merupakan pelapor pelanggaran, bisa merupakan karyawan dari organisasi itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pelapor yang berasal dari masyarakat (pihak eksternal).

Dari beberapa definisi *Whistleblowing* diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Whistleblowing* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk melaporkan suatu kecurangan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ataupun pekerja lain. Orang yang mengungkap suatu tindakan yang dianggap melanggar aturan oleh pekerja ataupun terindikasi penyelewengan peraturan ataupun fraud disebut sebagai *Whistleblower*.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Jalur *whistleblowing* terdiri dari tiga dimensi, yaitu internal dan eksternal, formal dan informal, serta anonim dan teridentifikasi, setiap dimensi tersebut merupakan pilihan bagi seseorang.

a. Internal dan eksternal

*Whistleblowing* internal terjadi ketika seseorang mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh orang lain yang berada pada organisasi yang sama

kemudian melaporkan kecurangan tersebut keatasannya. Sedangkan *whistleblowing* eksternal terjadi ketika seseorang mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau anggota dalam organisasi, kemudian memberitahukan kepada pihak di luar organisasi atau penegak hukum karena kecurangan tersebut merugikan masyarakat.

b. Formal dan informal

*Whistleblowing* formal adalah pelaporan kecurangan yang mengikuti prosedur pelaporan yang ada dalam organisasi. Sedangkan *whistleblowing* informal terjadi ketika seseorang melaporkan kecurangan kepada seorang yang ia percaya atau pada kelompok dekatnya.

c. Anonim atau teridentifikasi

*Whistleblowing* anonim terjadi ketika seseorang melaporkan kecurangan dengan menggunakan nama samaran atau tidak memberikan informasi terkait identitasnya. Sedangkan *whistleblowing* teridentifikasi terjadi ketika seseorang melaporkan kecurangan dengan memberikan informasi terkait identitasnya.

## **B. Manfaat *Whistleblowing System***

Menurut Komite Kebijakan Nasional Governance (2008:2) manfaat dari penyelenggaraan *whistleblowing system* yang baik antara lain adalah:

- 1) Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.

- 2) Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap system pelaporan yang efektif.
- 3) Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
- 4) Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat public.
- 5) Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi akibat dari pelanggaran, baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan reputasi.
- 6) Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran.
- 7) Meningkatkan reputasi perusahaan dimata pemangku kepentingan (*stakeholder*), regulator, dan masyarakat umum.
- 8) Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

### **C. Jenis-Jenis Whistleblowing**

Mekanisme *Whistleblower* adalah suatu system yang dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai penyimpangan yang diindikasikan terjadi di dalam suatu organisasi. Terdapat dua cara system pelaporan agar dapat berjalan dengan efektif (Shawver T, 2011) yaitu:

- 1) Mekanisme internal

Sistem pelaporan internal umumnya dilakukan melalui saluran komunikasi yang sudah baku dalam perusahaan. Sistem pelaporan internal *whistleblower* perlu ditegaskan kepada seluruh karyawan. Dengan demikian, karyawan dapat mengetahui otoritas yang dapat menerima laporan. Berbagai bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan seorang karyawan yang berperan sebagai *whistleblower*. Misalnya seperti perilaku tidak jujur yang berpotensi atau mengakibatkan kerugian finansial perusahaan, pencurian uang atau asset, perilaku yang mengganggu atau merusak keselamatan kerja, lingkungan hidup, dan kesehatan. Aspek kerahasiaan identitas *whistleblower*, jaminan bahwa *whistleblower* dapat perlakuan yang baik, seperti tidak diasingkan atau dipecat, perlu dipegang oleh pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris. Dengan demikian, dalam sistem pelaporan internal, peran pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris sangat penting. Pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris juga berperan sebagai orang yang melindungi *whistleblower* (*protection officer*).

Adapun infrastruktur dan mekanisme penyampaian laporan yaitu, perusahaan harus menyediakan saluran khusus yang digunakan untuk menyampaikan laporan pelanggaran, baik itu berupa e-mail dengan alamat khusus yang tidak dapat diterobos oleh bagian *Information Technology* (IT) perusahaan, atau kontak pos khusus yang hanya boleh diambil oleh petugas *whistleblowing system*, ataupun saluran telepon khusus yang akan dilayani oleh petugas khusus pula. Informasi mengenai adanya *hotline* ini haruslah diinformasikan secara meluas ke seluruh karyawan. Pelaporan pelanggaran haruslah disosialisasikan secara meluas, sehingga mudah diketahui oleh karyawan perusahaan (Shawver T, 2011). Dalam

prosedur penyampaian laporan pelanggaran harus dikirimkan langsung kepada direktur utama perusahaan.

## 2) Mekanisme Eksternal

Dalam system pelaporan secara eksternal diperlukan lembaga diluar perusahaan yang memiliki kewenangan untuk menerima laporan *whistleblower*. Lembaga ini memiliki komitmen tinggi terhadap perilaku yang mengedepankan standar legal, beretika, dan bermoral pada perusahaan. Lembaga tersebut bertugas menerima laporan, menelusuri atau menginvestigasi laporan, serta memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Lembaga tersebut berdasarkan UU yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus *whistleblowing*, seperti LPSK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Yudisial, PPATK, Komisi Kepolisian Nasional, dan Komisi Kejaksaan.

## D. Proses *Whistleblowing*

Near dan Miceli dalam jurnal Rheni Afriani dan Fajar (2017) menyebutkan ada tiga pihak yang terlibat dalam proses *Whistleblowing* yaitu Pelapor (*Whistleblower*), pelaku pelanggaran, dan pihak yang dilaporkan. Secara umum *whistleblowing* meliputi 4 tahapan yaitu:

- (1) *Whistleblower* potensial harus memutuskan apakah aktivitas yang disaksikan merupakan suatu pelanggaran, misalnya aktivitas ilegal, tidak bermoral atau tidak sah. Suatu aktivitas akan dianggap sebagai pelanggaran apabila aktivitas tersebut bertentangan dengan norma ataupun dengan ketentuan dalam suatu instansi ataupun suatu organisasi.

- (2) *Whistleblower* harus mempertimbangkan beberapa alternatif ketika mengambil keputusan. *Whistleblower* harus mempertimbangkan apakah pelanggaran tersebut dapat dihentikan tanpa adanya laporan pelanggaran. *Whistleblower* harus mempertimbangkan pula apakah akan mendapat dukungan mental dan finansial atas adanya laporan pelanggaran. *Whistleblower* harus menyadari siapa pihak berwenang yang harus mendapat laporan. *Whistleblower* juga harus mempertimbangkan apakah dia mampu menanggung biaya keuangan dan situasi mental yang ditimbulkan atas adanya laporan pelanggaran.
- (3) Ketika ada laporan *whistleblowing* maka organisasi atau instansi harus segera bertindak. Suatu instansi atau organisasi yang menjadi pihak yang dilaporkan dapat memilih untuk menghentikan tindakan pelanggaran atau mungkin memilih membiarkan pelanggaran tersebut.
- (4) Suatu instansi atau organisasi harus memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap *whistleblower*. Instansi dapat memilih untuk mengabaikan *whistleblower* atau membungkam *whistleblower* atau mendiskreditkan tuduhan yang dibuat *whistleblower*. Instansi juga dapat memilih untuk dapat menghukum atau memberi sanksi kepada pelaku pelanggaran.

Dikutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia pelapor pelanggaran (*whistleblower*) adalah istilah bagi karyawan, mantan karyawan, atau pekerja, anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. Secara umum segala tindakan yang melanggar ketentuan berarti melanggar hukum, aturan dan persyaratan yang menjadi ancaman pihak public atau kepentingan public. Termasuk didalam nya

korupsi, pelanggaran atas keselamatan kerja, dan masih banyak lagi. Dalam jurnalnya (Wardani, 2017) yang mengutip dari tulisan (Shawver T, 2011), yang menjelaskan bahwa seorang *whistleblower* sering kali dipahami sebagai seorang yang pertama kali mengungkapkan atau melaporkan tindakan yang dianggap legal ditempatnya bekerja kepada otoritas internal organisasi atau lembaga pemantau publik.

Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari dengan itikad baik dari sang pelapor tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya. Terdapat dua kriteria *whistleblower*, kriteria pertama yaitu seorang *whistleblower* menyampaikan atau mengungkapkan laporan kepada otoritas yang berwenang atau media massa dengan harapan dugaan atas kejahatan dapat diungkap dan dibongkar. Kriteria kedua *whistleblower* merupakan orang dalam, yaitu orang yang mengungkapkan dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi ditempatnya bekerja sehingga *whistleblower* benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan karena berada dalam tempatnya bekerja.

#### **E. Indikator Pengukuran *Whistleblowing System***

Di dalam Pedoman *Whistleblowing System* yang diterbitkan KNKG (2008), ada tiga aspek pengukuran:

##### **1. Aspek Struktural**

Aspek struktural merupakan aspek yang berisikan elemen-elemen infrastruktur *whistleblowing system*. Aspek ini berisikan 4 elemen, yaitu:

###### **a. Pernyataan Komitmen**

Diperlukan adanya pernyataan komitmen dari seluruh karyawan akan kesediaannya untuk melaksanakan *whistleblowing system* dan berpartisipasi aktif untuk ikut melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran. Secara teknis, pernyataan ini dapat dibuat tersendiri atau dijadikan dari bagian perjanjian kerja bersama, atau bagian dari pernyataan ketaatan terhadap pedoman etika perusahaan.

#### b. Kebijakan Perlindungan Pelapor

Perusahaan harus bisa membuat kebijakan perlindungan pelapor (*whistleblower protection policy*). Kebijakan ini menjelaskan adanya perlindungan pelapor adalah untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan kecurangan, serta menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya.

#### c. Struktur Pengelolaan *Whistleblowing System*

Perusahaan harus membuat unit pengelolaan *whistleblowing system* dengan tanggung jawab ada pada direksi dan komite audit. Unit ini harus independen dari operasi perusahaan sehari-hari dan mempunyai akses kepada pimpinan tertinggi perusahaan. Unit pengelola *whistleblowing system* memiliki 2 elemen utama, yaitu sub-unit perlindungan pelapor dan sub-unit investigatif. Penunjukkan petugas pelaksana unit ini harus dilakukan oleh pihak yang profesional dan independen, sehingga hasil yang diperoleh relatif lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa bebas dari unsur-unsur kepentingan pribadi.

#### d. Sumber Daya

Sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan *whistleblowing system* adalah kecukupan kualitas dan jumlah personil untuk melaksanakan tugas sebagai

petugas pengelola *whistleblowing system* dan media komunikasi sebagai fasilitas pelaporan pelanggaran.

## **2. Aspek Operasional**

Aspek operasional merupakan aspek yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur kerja *whistleblowing system*.. Perusahaan harus menyediakan saluran khusus yang digunakan untuk menyampaikan laporan pelanggaran, baik berupa email dengan alamat khusus yang tidak dapat ditembus oleh bagian *Information Technology* (IT) perusahaan, kotak pos khusus yang hanya boleh diambil petugas Sistem Pelaporan Pelanggaran, ataupun saluran telepon khusus yang akan ditangani oleh petugas khusus pula. Informasi mengenai adanya saluran atau sistem ini dan prosedur penggunaannya haruslah diinformasikan secara meluas ke seluruh karyawan. Dalam prosedur penyampaian laporan pelanggaran juga harus dicantumkan dalam hal pelapor melihat bahwa pelanggaran dilakukan petugas Sistem Pelaporan Pelanggaran, maka laporan pelanggaran harus dikirimkan langsung kepada direktur utama perusahaan. Selain itu, kerahasiaan dan kebijakan perlindungan pelapor juga harus diperhatikan. Perusahaan juga hendaknya mengembangkan budaya yang mendorong karyawan untuk berani melaporkan tindakan kecurangan yang diketahuinya dengan memberikan kekebalan atas sanksi administratif kepada para pelapor yang beritikad baik. Petugas pelaksana unit *whistleblowing system* segera mungkin melakukan investigasi dengan mengumpulkan bukti terkait kasus yang dilaporkan. Hal ini untuk menentukan apakah laporan kecurangan dapat ditindaklanjuti atau tidak.

## **3. Aspek Perawatan**

Aspek perawatan merupakan aspek yang memastikan bahwa *whistleblowing system* ini dapat berkelanjutan dan meningkat efektivitasnya. Perusahaan harus melakukan pelatihan dan pendidikan kepada seluruh karyawan, termasuk para petugas unit *whistleblowing system*. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan komunikasi secara berkala dengan karyawan mengenai hasil dari penerapan *whistleblowing system*. Pemberian insentif atau penghargaan oleh perusahaan kepada para pelapor pelanggaran dapat mendorong karyawan lainnya yang menyaksikan, tetapi tidak melaporkan menjadi tertarik untuk melaporkan adanya pelanggaran.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian dimana objek dan variable penelitian biasanya hampir sama dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pembanding terhadap penelitian ini. Penelitian yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi dan penyedia informasi pengendalian internal yang berasal dari berbagai literatur seperti jurnal sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No. | Penulis                                                                    | Judul                                                                                                                                                                                                   | Metode Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hasil                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Siti Rohmah<br>Erni Setiawati<br>Sugeng Chairuddin<br>Risma Aditama (2023) | Pengaruh Akuntansi Forensik, Whistleblowing system dan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Fraud (Studi kasus pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektorat Daerah Kota Samarinda) | Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dari penyebaran kuesioner kepada auditor yang bekerja di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda. Dari hasil analisis uji secara parsial diketahui bahwa akuntansi forensik dan whistleblowing system tidak berpengaruh signifikan dalam pengungkapan fraud. | Hasil pengujian secara simultan menyatakan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pengungkapan fraud. |

|    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                        | Sedangkan audit investigasi berpengaruh signifikan dalam pengungkapan fraud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. | Fera Firyal Thahir (2024)                                                                                      | Determinan Pendeteksian Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan : Studi Empiris pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan                                               | Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Nonprobability Sampling (Sampel jenuh), dan jumlah sampel sebanyak 41 responden. Metode pengambilan menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda.                                                                                      | Hasil penelitian menunjukkan pemahaman good governance tidak berpengaruh dan keahlian auditor internal berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan.                                                                                                                                                                          |
| 3. | Mohammed Faishal Kusumoaji (2023)                                                                              | Pengaruh Peran Audit Internal, Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Surakarta) | Metode pengambilan sampel dengan cara purposive sampling sesuai kriteria dan menggunakan rumus Slovin. Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 109 responden. Data pada penelitian ini menggunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner dan dibantu software SPSS versi 25.                                                                                                                                  | Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel peran audit internal, good corporate governance dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini berarti ketiga variabel tersebut berdampak pada pencegahan fraud khususnya pada bank perkreditan rakyat di Kota Surakarta.                                    |
| 4. | Istiqomah Rahmayati Brutu, Henny Zurika Lubis, Maya Sari, Andi Auliya Ramadhany dan Debby Chyntia Ovami (2024) | Effect of internal audit, internal control, and audit quality on fraud prevention: Evidence from the public sector in Indonesia                                        | Sampelnya meliputi 61 auditor internal pemerintah pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. pencegahan penipuan, auditor internal, SEM-PLS, Indonesia Proses pengumpulan data dilakukan dengan pemberian kuesioner menggunakan Google Forms. Selain itu, penyelidikan ini menilai konstruksi yang diteliti dengan menggunakan pendekatan Likert lima poin dan pendekatan kuadrat terkecil parsial (PLS). | Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan ( $p < 0,05$ ). Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, hendaknya melakukan audit internal, menerapkan sistem pengendalian internal, dan memperhatikan kualitas audit agar lebih efektif sebagai dasar pengambilan keputusan |
| 5. | Adelia Nur Hasanah, Maria dan Anggeraini Oktarida (2023)                                                       | Pengaruh E-Procurement dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin.                                                  | Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berjumlah 51 OPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hasil penelitian menunjukkan e-procurement dan whistleblowing system berpengaruh positif dan                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                          |                                                                                                                                                        | (menggunakan sampel jenuh). Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan responden para pelaku pengadaan (PPK, POKJA Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan). Data dianalisis dengan teknik regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 25 | signifikan terhadap pencegahan fraud pengadaan sebesar 64,8%. Secara parsial, e-procurement dan whistleblowing system juga berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengadaan. Whistleblowing system lebih dominan memengaruhi pencegahan fraud pengadaan dibandingkan dengan e-procurement |
| 6.. | Agustiawan et al. (2022) | Pengaruh budaya organisasi, proactive fraud audit, whistleblowing dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS. | Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji analisis data menggunakan metode regresi linier berganda yang pengolahannya dengan menggunakan SPSS 25. sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 113 sekolah                                   | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi, proactive fraud audit dan whistleblowing berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana BOS. Sedangkan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana BOS.   |

## 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan atau keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya dalam masalah yang diteliti. Kerangka konseptual ini digunakan untuk menghubungkan atau menggambarkan topik yang dibahas secara panjang dan luas. Kerangka ini berasal dari ilmu pengetahuan atau teori yang digunakan sebagai landasan teori terkait dengan variabel yang diteliti.

### 2.3.1 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*

Didalam suatu organisasi perlu adanya pengendalian internal dimana tujuan dari pengendalian internal dapat dimanfaatkan untuk melindungi suatu organisasi terhadap kecurangan. Dengan diterapkannya pengendalian internal maka otomatis intitusi akan terbebas dari tindakan kecurangan. Sistem pengendalian yang efektif

akan mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Untuk mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi, diperlukan pengendalian internal yang ketat. Pengendalian internal yang efektif akan mempersulit seseorang untuk melakukan kecurangan kecuali jika ada kolusi. Pengendalian internal sangat penting dalam mengurangi kecurangan akuntansi, semakin efektif sistem pengendalian internal diterapkan sesuai dengan standar yang dimiliki organisasi, maka semakin rendah tingkat kecurangan yang dihasilkan.

(Karolina et al., 2022) mengerjakan studi anti-penipuan terkait pengendalian internal. Berdasarkan temuan tersebut, pengendalian internal memainkan peran penting dalam mencegah penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif akan mengurangi atau menghilangkan godaan dan insentif yang mungkin menyebabkan pekerja berperilaku tidak etis, ilegal, atau tidak jujur. Selain itu, penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang telah dilakukan (Meutia, 2021), (Kusumoaji & Aris, 2023), (Supriyanto, 2022), dan (Rahmadani & Sugiarto, 2023). Kemampuan perusahaan untuk menghindari kecurangan berbanding lurus dengan kualitas pengendalian internalnya. Jika tujuan perusahaan sesuai dengan rencana, maka tindakan pengendalian internal yang digunakan untuk menghindari kecurangan adalah efektif (Nugroho & Afifi, 2022).

### **2.3.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan Fraud**

Implementasi *Good Corporate Governance* yang efektif dan efisien pada suatu organisasi, akan meminimalkan terjadinya kecenderungan kecurangan. Sebaliknya jika implementasi *Good Corporate Governance* kurang efektif, maka akan menambah terjadinya kecenderungan kecurangan. (Kusumoaji & Aris, 2023)

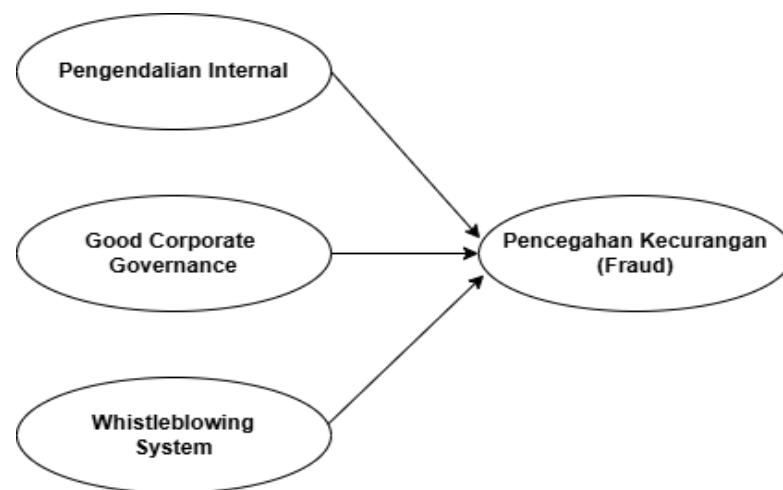
melakukan penelitian pencegahan penipuan untuk kepentingan internal perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik secara signifikan berdampak positif pada pencegahan penipuan. Penelitian ini setuju dengan (Naufal, 2023), (Rahmadani & Sugiarto, 2023), dan (Nugroho & Afifi, 2022). Jika pengelolaan suatu perusahaan tidak profesional, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, maka akan lebih besar kemungkinan terjadinya kecurangan. Di sisi lain, tata kelola perusahaan yang baik dapat mencegah terjadinya kecurangan (Kurniawan & Izzaty, 2019).

### **2.3.3 Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud***

*Whistleblowing system* perlu diterapkan di setiap perusahaan, baik sektor swasta maupun publik. *Whistleblowing system* merupakan bagian dari sistem pengendalian internal yang dapat mencegah praktik penyalahgunaan dan kecurangan serta memperkuat penerapan tata kelola yang baik, meskipun pada kenyataannya kecurangan masih terdeteksi di banyak tempat, baik di sektor publik maupun swasta, seperti kasus penggelapan dana maupun kasus mark up harga yang sering terjadi dalam kegiatan pengadaan di beberapa instansi pemerintah (KNKG, 2008).

(Priandini & Biduri, 2023) menyelidiki efektivitas sistem pelaporan pelanggaran dalam mencegah penipuan. Berdasarkan temuan tersebut, sistem *whistleblower* memang berdampak pada upaya melawan penipuan. Penelitian ini setuju dengan (Mahdi & Darwis, 2020), (Khoirunnisa et al., 2021), (Hasanah et al., 2023), dan (Rahmawati & Tarjo, 2023).

Membangun sistem yang dapat diandalkan, terbuka, dan bertanggung jawab Dengan memberikan kesempatan kepada warga negara dan pekerja untuk melaporkan kesalahan mereka kepada pihak yang berwenang, sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) memberdayakan masyarakat untuk memerangi penipuan dan korupsi (Priandini & Biduri, 2023). Tingkat pencegahan penipuan berbanding lurus dengan efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran (Murtiningrum & Kuntadi, 2023).



Gambar 2.1 Kerangka berpikir konseptual

## 2.4 Hipotesis

1. Ada pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
2. Ada pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
3. Ada pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2018:63) penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua atau lebih variabel penelitian. Pada penelitian ini maka dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Sugiyono (2018:8) menyatakan metode kuantitatif berarti pendekatan ini berfokus pada populasi atau sampel tertentu dan dilakukan dengan pengumpulan data melalui berbagai instrumen penelitian. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis dengan melakukan survey langsung dan menyebarkan kuesioner pada lokasi penelitian yaitu pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara serta melakukan pengolahan data yang dari kuesioner yang diisi oleh responden, melakukan analisis data yaitu Partial Least Square (PLS)-SEM dengan software SmartPLS dan membuat kesimpulan.

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Defenisi operasional variabel merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur atau mempermudah pemahaman dalam membahas suatu penelitian. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari variabel independen dan variabel dependen.

### 3.2.1 Variabel Bebas/Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2017) variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel terikat. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengendalian Internal ( $X_1$ ), *Good Corporate Governance* ( $X_2$ ) dan *Whistleblowing System* ( $X_3$ ).

### 3.2.2 Variabel Terikat (Y)

Menurut Sugiyono (2017) variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi/ yang menjadi akibat karena adanya variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Untuk mengukur variabel terikat, yaitu Pencegahan Kecurangan (*fraud*) Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara (Y).

**Tabel 3.2**  
**Defenisi Operasional variabel**

| Jenis Variabel                      | Defenisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Pengukuran Variabel                                                                                                                                                                        | Skala   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Pengendalian Internal ( $X_1$ )     | Pengendalian internal merupakan suatu proses, karena pengendalian internal melekat pada setiap aktivitas operasional perusahaan dan juga sebagai bagian dari aktivitas dasar manajemen.                                                                                    | 1. Lingkup Pekerjaan.<br>2. Penilaian Risiko.<br>3. Aktivitas Pengendalian.<br>4. Informasi dan Komunikasi.<br>5. Pemantauan.<br>Sumber: (COSO, 2013)                                                | Ordinal |
| Good Corporate Governance ( $X_2$ ) | Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengatur, mengelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, serta mengawasi proses pengendalian usaha, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, dan masyarakat. | 1. keterbukaan (transparency),<br>2. akuntabilitas (accountability),<br>3. pertanggungjawaban (responsibility)<br>4. independensi (professional),<br>5. kewajaran (fairness).<br>Sumber: (OJK, 2015) | Ordinal |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Whistleblowing system (X3)                 | Whistleblowing system adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek struktural</li> <li>2. Aspek Operasional</li> <li>3. Aspek Perawatan</li> </ol> <p>Sumber: (KNKG: 2008)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ordinal |
| Pencegahan kecurangan ( <i>fraud</i> ) (Y) | Pencegahan <i>fraud</i> digunakan untuk mencegah seseorang melakukan kecurangan dengan cara melanggar hukum untuk memperoleh manfaat untuk diri sendiri.                                                                                                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun integritas.</li> <li>2. Menciptakan kepemimpinan teladan.</li> <li>3. Meminimumkan kesempatan.</li> <li>4. Meminimumkan kesempatan.</li> <li>5. Mengembangkan sistem pengendalian internal yang baik.</li> <li>6. Mengembangkan kebijakan dan sistem pencegahan kolusi.</li> <li>7. Mengembangkan sistem monitoring, hotline dan whistle blowing system.</li> <li>8. Mengembangkan sistem pemberian penghargaan dan hukuman.</li> <li>9. Menciptakan keseimbangan kekuasaan.</li> </ol> <p>Sumber: (Tuanakotta., 2015)</p> | Ordinal |

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Instansi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 8. Alasan utama pengambilan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara karena Inspektorat Provinsi Sumatera Utara masih banyak disorot/ dilihat akibat dari masih adanya temuan BPK terhadap LKPD yang dapat mengakibatkan kerugian daerah. Kemungkinan banyaknya

temuan yang tidak terdeteksi oleh pihak Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Sehingga peneliti tertarik untuk menguji pengaruh pengendalian internal, *good corporate governance* dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

### 3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan mulai dari bulan April 2024 sampai September 2024. Rencana kegiatan penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

**Rencana Jadwal Penelitian**

| No | Aktivitas Penelitian   | Des-Jan |   |   |   | Feb-Mar |   |   |   | Apr-Mei |   |   |   | Jun-Jul |   |   |   | Agu-Nov |   |   |   |
|----|------------------------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|
|    |                        | 1       | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Pengajuan Judul        |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |
| 2  | Pembuatan Proposal     |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |
| 3  | Waktu Pengambilan Data |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |
| 4  | Bimbingan Proposal     |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |
| 5  | Seminar Proposal       |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |
| 6  | Penyempurnaan Proposal |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |
| 7  | Penyusunan Tugas Akhir |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |
| 8  | Bimbingan Tugas Akhir  |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |
| 9  | Sidang Meja Hijau      |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |

## 3.4 Teknik Pengambilan Sampel

### 3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2013:61) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi

juga bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek lain.

Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal lain yang menarik yang peneliti ingin selidiki (Sekaran, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah auditor internal yang ada di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Populasi pada penelitian ini adalah 69 auditor internal pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 3.4.1**

**Populasi Auditor Internal Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024**

| <b>No.</b>               | <b>Jabatan</b>                     | <b>Jumlah</b> |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1.                       | Auditor Ahli Utama                 | 0             |
| 2.                       | Auditor Ahli Madya                 | 10            |
| 3.                       | Auditor Ahli Muda                  | 25            |
| 4.                       | Auditor Ahli Pertama               | 32            |
| 5.                       | Auditor Penyelia                   | 1             |
| 6.                       | Auditor Mahir (Pelaksana Lanjutan) | 1             |
| <b>Total keseluruhan</b> |                                    | <b>69</b>     |

### **3.4.2 Sampel Penelitian**

Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi dan dipilih secara hati-hati. Ada dua bentuk pengambilan sampel secara umum yaitu probability sampling dan nonprobability sampling (Juliandi et al., 2014). Pada penelitian ini pengambilan sampel secara probability sampling menggunakan simple random sampling dengan ukuran sampel menggunakan rumus slovin. Rumus Slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Maka disusun perhitungan sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$n$  = Ukuran sampel

$N$  = Ukuran populasi

$e$  = batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)  $e = 10\%$  (0,01)

Berdasarkan rumus diatas maka sampel dalam penelitian dapat ditarik sebagai berikut:

$$n = \frac{69}{1 + 69(0,1)^2}$$

$$n = \frac{69}{1 + 69 (0,01)}$$

$$n = \frac{69}{1 + 0,69}$$

$$n = 40,82$$

$$n = 41$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 41 orang Audit Internal Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

| No                | Jabatan                            | Jumlah | Sampel |
|-------------------|------------------------------------|--------|--------|
| 1                 | Auditor Ahli Utama                 | 0      | 0      |
| 2                 | Auditor Ahli Madya                 | 10     | 6      |
| 3                 | Auditor Ahli Muda                  | 25     | 12     |
| 4                 | Auditor Ahli Pertama               | 32     | 21     |
| 5                 | Auditor Penyelia                   | 1      | 1      |
| 6                 | Auditor Mahir (Pelaksana Lanjutan) | 1      | 1      |
| Total Keseluruhan |                                    | 69     | 41     |

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer. Pada penelitian ini data dan informasi yang diberikan responden sesuai dengan kriteria sampel penelitian. Data primer adalah data yang langsung diberikan kepada orang

yang mengumpulkannya (Simangunsong, 2022:31).

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner (daftar pertanyaan) yang diajukan kepada responden. Adapun prosedur dalam metode pengumpulan data ini yaitu, membagikan kuesioner tersebut, lalu responden diminta untuk mengisi kuesioner pada lembar jawaban yang telah disediakan, kemudian lembar kuesioner dikumpulkan, diseleksi, diolah dan dianalisis. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup dan alternatif jawaban responden telah disediakan oleh peneliti. Isi dari kuisisioner berupa daftar pertanyaan tertulis kepada responden tentang pengaruh pengendalian internal, *good corporate governance* dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Untuk mengukur pendapat responden digunakan tipe skala pengukuran ordinal dengan 5 skala likert. Dengan memberikan skor dari jawaban kuesioner yang diisi repsonden dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Skala Likert**

| No | Notasi | Pertanyaan           | Bobot |
|----|--------|----------------------|-------|
| 1  | SM     | Sangat Memadai       | 5     |
| 2  | M      | Memadai              | 4     |
| 3  | CM     | Cukup Memadai        | 3     |
| 4  | TM     | Tidak Memadai        | 2     |
| 5  | STM    | Sangat Tidak Memadai | 1     |

Sumber: (Juliandi et al., 2016)

### 3.5.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2019:175) hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk

mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.

Menurut Khairinal (2016:347) untuk menguji apakah instrumen yang digunakan valid atau tidak, digunakan rumus *Korelasi product moment*:

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

n = banyaknya pasangan pengamatan

$\sum x$  = jumlah pengamatan variabel X

$\sum y$  = jumlah pengamatan variabel Y

$(\sum x^2)$  = jumlah kuadrat pengamatan variabel X

$(\sum y^2)$  = jumlah kuadrat pengamatan variabel Y

$\sum xy$  = jumlah hasil kali sampel X dan Y

Dalam penelitian ini uji Validitas menggunakan rumus *Korelasi product moment*. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan valid atau tidak, maka  $r_{xy}$  yang telah diperoleh ( $r_{hitung}$ ) ditunjukkan dengan besarnya  $r_{tabel}$  *product moment* pada  $\alpha$  5%. Kriteria uji validitas apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka dapat dikatakan angket/kuesioner valid dan apabila  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka angket dikatakan tidak valid. Syarat tersebut menurut (Sugiyono, 2020:180) yang harus dipenuhi:

4. Jika  $r > 0,30$  maka item pertanyaan dari kuesioner valid.
5. Jika  $r < 0,30$  maka item pertanyaan dari kuesioner tidak valid.

Terdapat dua kriteria untuk menilai apakah outer model (model pengukuran) memenuhi syarat validitas konvergen untuk konstruk reflektif, yaitu

(1) loading harus di atas 0,7 dan (2) nilai p signifikan ( $< 0,05$ ) (Hair, et al, 2014). Namun dalam beberapa kasus, sering syarat loading di atas 0,7 sering tidak terpenuhi khususnya untuk kuesioner yang baru dikembangkan. Oleh karena itu, loading antara 0,40-0,70 harus tetap dipertimbangkan untuk dipertahankan (Mahmud & Ratmono, 2013:66).

Berdasarkan hasil uji validitas ini disajikan nilai-nilai loading untuk tiap-tiap indikator sebagai berikut:

**Tabel 3. 6**  
**Pengujian Validitas berdasarkan Loading Faktor**

|       | Pengendalian Internal | Good Corporate Governance | Whistleblowing System | Pencegahan Fraud |
|-------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| X1.1  | 0.856                 |                           |                       |                  |
| X1.10 | 0.863                 |                           |                       |                  |
| X1.2  | 0.731                 |                           |                       |                  |
| X1.3  | 0.767                 |                           |                       |                  |
| X1.4  | 0.795                 |                           |                       |                  |
| X1.5  | 0.841                 |                           |                       |                  |
| X1.6  | 0.739                 |                           |                       |                  |
| X1.7  | 0.761                 |                           |                       |                  |
| X1.8  | 0.791                 |                           |                       |                  |
| X1.9  | 0.805                 |                           |                       |                  |
| X2.1  |                       | 0.760                     |                       |                  |
| X2.10 |                       | 0.792                     |                       |                  |
| X2.2  |                       | 0.758                     |                       |                  |
| X2.3  |                       | 0.797                     |                       |                  |
| X2.4  |                       | 0.799                     |                       |                  |
| X2.5  |                       | 0.765                     |                       |                  |
| X2.6  |                       | 0.761                     |                       |                  |
| X2.7  |                       | 0.755                     |                       |                  |
| X2.8  |                       | 0.775                     |                       |                  |
| X2.9  |                       | 0.737                     |                       |                  |
| X3.1  |                       |                           | 0.736                 |                  |
| X3.2  |                       |                           | 0.879                 |                  |
| X3.3  |                       |                           | 0.860                 |                  |
| X3.4  |                       |                           | 0.847                 |                  |
| X3.5  |                       |                           | 0.799                 |                  |
| X3.6  |                       |                           | 0.801                 |                  |
| X3.7  |                       |                           | 0.774                 |                  |
| X3.8  |                       |                           | 0.853                 |                  |
| Y1.1  |                       |                           |                       | 0.855            |
| Y1.2  |                       |                           |                       | 0.851            |
| Y1.3  |                       |                           |                       | 0.827            |
| Y1.4  |                       |                           |                       | 0.727            |
| Y1.5  |                       |                           |                       | 0.851            |
| Y1.6  |                       |                           |                       | 0.861            |
| Y1.7  |                       |                           |                       | 0.848            |
| Y1.8  |                       |                           |                       | 0.892            |
| Y1.9  |                       |                           |                       | 0.804            |

Berdasarkan pengujian validitas loading faktor pada tabel 3.6, seluruh nilai *loading* > 0,7, yang berarti telah memenuhi syarat validitas

Berdasarkan nilai *loading*. Selanjutnya dilakukan pengujian validitas berdasarkan nilai *average variance extracted* (AVE).

**Tabel 3. 7**  
**Pengujian Validitas Berdasarkan Average Variance Extracted(AVE)**

| Variabel                              | Average Variance Extracted (AVE) |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Pengendalian Internal (X1)            | 0,634                            |
| <i>Good Corporate Governance</i> (X2) | 0,593                            |
| <i>Whistleblowing System</i> (X3)     | 0,672                            |
| Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)           | 0,699                            |

(Sumber: Output Hasil Olahan SEM PLS, 2024)

Nilai AVE yang disarankan adalah diatas 0,5 (Mahmud & Ratmono, 013:67). Diketahui seluruh nilai AVE > 0,5, yang berarti telah memenuhi syarat validitas berdasarkan AVE.

### 3.5.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan Uji reliabilitas adalah untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, suatu kuesioner dikatakan *reliable* (andal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,7 dan variabel dikatakan tidak *reliable* jika memberikan nilai Cronbach Alpha < 0,7 serta nilai CR yang disarankan adalah di atas 0,7 (Mahmud & Ratmono, 2013:67). Pengujian reabilitas dapat menggunakan teknik Cronbach Alpha dengan rumus:

$$r^2 \left[ \frac{k}{(k-1)} \right] \left[ \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma i^2} \right]$$

(Juliandi *et al.*, 2016)

Keterangan:

$r^2$  = reliabilitas instrument (Cronbach alpha)

$k$  = banyaknya butir pertanyaan  
 $\sum \sigma b^2$  = jumlah varian butir  
 $\sigma t^2$  = varians total

**Tabel 3. 8**  
**Composite Reliability dan Cronbach's Alpha**

| Variabel | Composite Reliability | Cronbach's Alpha | Kriteria | Keterangan |
|----------|-----------------------|------------------|----------|------------|
| X1       | 0,941                 | 0,935            | > 0,7    | Valid      |
| X2       | 0,925                 | 0,924            | > 0,7    | Valid      |
| X3       | 0.944                 | 0,930            | > 0,7    | Valid      |
| Y        | 0,948                 | 0,946            | > 0,7    | Valid      |

(Sumber: Output Hasil Olahan SEM PLS, 2024)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas tersebut, dapat dilihat bahwa nilai cronbach's alpha dan nilai composite reliability masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah lebih dari 0,7. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator pada variabel penelitian ini adalah reliabel.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, data tabulasi berdasarkan variabel dari seluruh responden, data setiap variabel yang disajikan, dilakukan perhitungan untuk memberi jawaban pada rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk pengujian hipotesis yang diajukan (Sugiyono, 2017). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan software SmartPLS versi 4.0 untuk menganalisis data. Hal ini dikarenakan model hubungan pengaruh (kausalitas) yang digunakan dalam penelitian ini.

PLS adalah metode yang sangat efektif karena metode tersebut tidak bergantung pada banyaknya asumsi (Abdillah & Hartono, 2015). Partial Least Square atau PLS merupakan model persamaan Structure Equation Modelling (SEM) dengan pendekatan yang didasari oleh varian atau component-based

structural equation modelling. Menurut Ghazali & Latan (2015), PLS digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya suatu korelasi antara variabel laten. Variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. PLS adalah metode analisis yang powerfull karena tidak didasarkan banyak asumsi dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval, sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). Analisis SEM-PLS ini terdiri dari 2 sub model: yaitu model pengukuran yang juga dikenal outer model dan model struktural/ inner model.

Model pengukuran menunjukkan bagaimana variabel laten yang akan diukur diwakili oleh variabel manifest yang juga dikenal dengan observed variable. Sedangkan model struktural menunjukkan kekuatan estimasi antar variabel laten dan konstruk. (Ghozali & Latan, 2015).

Metode PLS memberikan sejumlah keunggulan dibandingkan jenis analisis lainnya, antara lain:

- 1) Distribusi normal multivariat tidak mengharuskan digunakan data.
- 2) Tidak mewajibkan menggunakan ukuran sampel yang berlebihan.
- 3) PLS dapat memeriksa suatu konstruk yang menggunakan indikator formatif dan indikator refleksi (principal factor model) pada saat yang bersamaan.
- 4) Selain untuk mengkonfirmasi teori, PLS dapat digunakan untuk menetapkan ada atau tidaknya hubungan terhadap variabel laten.

Teknik analisis data dan model persamaan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi tambahan yaitu: software SmartPLS 4.0. Menurut Abdillah & Hartono (2015), ada beberapa langkah dilakukan dalam analisis PLS, antara lain:

1. Merancang inner model (model struktural)
2. Merancang outer model (model pengukuran)
3. Mengkontruksi diagram jalur
4. Membuat sistem persamaan yang didasarkan pada diagram jalur
5. Mengestimasi koefisien jalur, weight, dan loading
6. Mengevaluasi *goodness of fit*
7. Melakukan pengujian hipotesis (resampling bootstrapping)

### 3.6.1 Analisa Model Pengukuran (Outer Model)

Analisa Outer model juga dikenal sebagai model measurement atau outer relation, yang merupakan model yang menggambarkan hubungan antara indikator yang ada dan variabel latennya. Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Berikut ini rumus yang digunakan untuk menggambarkan pemeriksaan ini adalah:

Variabel laten eksogen (X):  $X = \lambda_x I + \delta$

Variabel Laten Endogen:  $X = \lambda_y \xi + \epsilon$

Keterangan:

$\xi$  ( $\xi_i$ ) : Variabel laten independen

$\lambda$  (Lamda) : Bobot faktor antara variabel laten dengan indikatornya

$\epsilon$  (Epsilon) : Pengukuran error indikator dependen

$\delta$  (Delta) : Pengukuran error indikator independen

$\eta$  (Eta) : Variabel dependen

Dalam analisa model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indkatornya. Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa indikator:

- 1) *Convergent Validity* adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antar

item score/component score dengan construct score, yang dapat dilihat dari standardized loading faktor yang mana menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi  $> 0,7$  dengan konstruk yang ingin diukur, sedangkan menurut Chin yang dikutip oleh Imam Ghozali, nilai outer loading antara 0,5-0,6 sudah dianggap cukup.

- 2) *Discriminant Validity* merupakan model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya. Sedangkan menurut model lain untuk menilai discriminant validity yaitu dengan membandingkan nilai *squareroot of average variance extracted (AVE)*.
- 3) *Composite reliability* merupakan indikator untuk mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada view latent variable coefficient. Untuk mengevaluasi *composite reliability* terdapat dua alat ukur yaitu internal consistency dan *cronbach's alpha*. Dengan pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah  $> 0,70$  maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi.
- 4) *Cronbach's Alpha* merupakan uji reliabilitas yang dilakukan merupakan hasil dari composite reliability. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *cronbach's alpha*  $> 0,7$ .

### 3.6.2 Analisa Model Struktural (Inner Model)

Uji inner model digunakan untuk menguji suatu hipotesis dari variabel satu

dengan variabel lainnya sehingga dapat memperlihatkan tingkat pengaruh dan signifikansinya dari hubungan tersebut. Analisis Inner Model biasanya juga disebut dengan (*inner relation, structural model dan substantive theory*) yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada substantive theory. Analisa inner model dapat dievaluasi dengan menggunakan tiga pengujian yaitu sebagai berikut.

### 1. *R-Square*

*R-Square* adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel dipengaruhi (endogen) yang dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen). Ini berguna untuk memprediksi apakah model baik/buruk. Adapun kriteria *R-Square* menurut (Juliandi, 2018) adalah:

- Jika nilai (adjusted) = 0,75 → model adalah substansial (kuat).
- Jika nilai (adjusted) = 0,50 → model adalah moderate (sedang).
- Jika nilai (adjusted) = 0,25 → model adalah lemah (buruk).

### 2. *F-Square*

Pengukuran *F-Square* atau *effect size* adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relative dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Pengukuran *F-Square* disebut juga efek perubahan yang artinya perubahan nilai saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model, akan dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan memiliki dampak substansif pada konstruk endogen (Juliandi, 2018).

Kriteria pengukuran *F-square* adalah:

- Jika nilai  $f^2 = 0,35$  → Efek yang besar dari variabel eksogen terhadap endogen.

- Jika nilai  $f^2 = 0,15 \rightarrow$  Efek yang sedang/moderat dari variabel eksogen terhadap endogen.
- Jika nilai  $f^2 = 0,02 \rightarrow$  Efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen.

### 3. Q-Square

Prediction relevance (Q-Square) dikenal dengan Stone-Geisser's. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kapabilitas prediksi seberapa baik nilai yang dihasilkan. Apabila nilai yang didapatkan 0.02 (kecil), 0.15 (sedang) dan 0.35 (besar). Hanya dapat dilakukan untuk konstruk endogen dengan indikator reflektif.

### 3.6.3 Uji Hipotesis

Selanjutnya hasil penelitian akan diuji dengan uji T-test dengan menggunakan metode bootstrapping. Tujuannya adalah memungkinkan berlakunya data terdistribusi bebas, tidak memerlukan asumsi distribusi normal dan tidak membutuhkan sampel yang besar (minimum 30 sampel). Prosedur bootstrapping menghasilkan nilai t-statistik untuk setiap jalur hubungan yang digunakan untuk menguji hipotesis. Nilai t-statistik tersebut akan dibandingkan dengan nilai t-tabel. Penelitian yang menggunakan tingkat kepercayaan 95% sehingga tingkat presisi atau batas ketidakakuratan ( $\alpha$ ) = 5% = 0,05. Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel ( $t\text{-statistik} < 1.96$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel ( $t\text{-statistik} > 1.96$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (Ghozali dan Latan, 2015).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Deskripsi Data

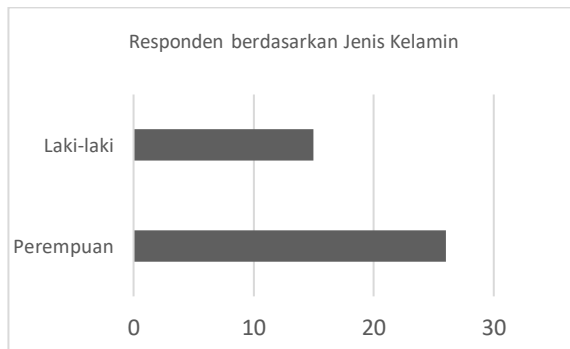
Pada penelitian ini, peneliti memilih Auditor Internal yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung dengan cara mendatangi responden Auditor Internal yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Responden dalam penelitian ini adalah 41 orang Auditor Internal yang bekerja di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

##### 4.1.1 Karakteristik Responden

###### 1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.1.1**

**Jenis Kelamin Responden Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara**



| Klasifikasi Jenis Kelamin | Frekuensi (orang) | Presentase (%) |
|---------------------------|-------------------|----------------|
| Laki-Laki                 | 15                | 36.58%         |
| Perempuan                 | 26                | 63.41%         |
| Jumlah                    | 41                | 100%           |

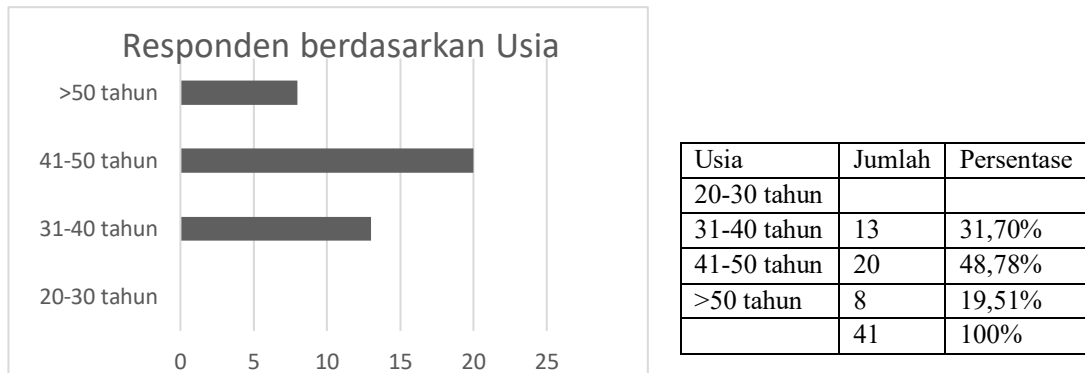
(Sumber: Output Hasil Olahan SEM PLS, 2024)

Berdasarkan data tabel diatas, menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini paling banyak berjenis kelamin perempuan sebanyak 26 orang dengan persentase 63.41% dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 15 orang dengan persentase 36.58%. Jadi total keseluruhan responden sebanyak 41 orang.

## 2. Responden Berdasarkan Usia

**Tabel 4.1.2**

### Usia Responden pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara



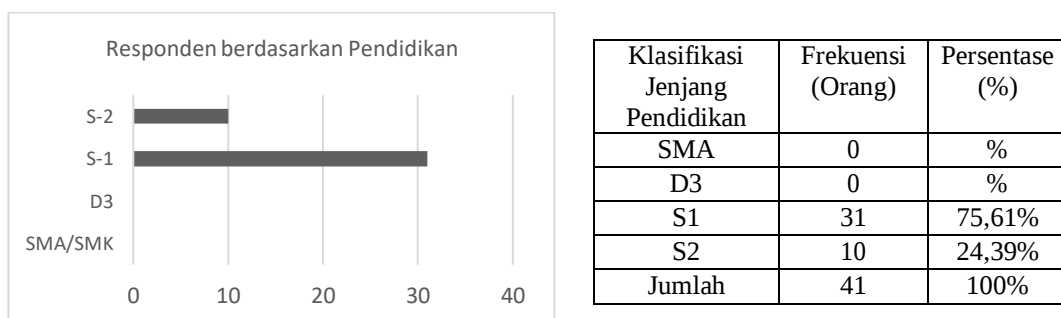
(Sumber: Output Hasil Olahan SEM PLS, 2024)

Berdasarkan data tabel diatas, menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini paling banyak yang rentang usia 41-50 tahun sebanyak 20 orang dengan persentase 49%, rentang usia 31-40 tahun sebanyak 13 orang dengan persentase 32% dan rentang usia >50 tahun sebanyak 8 orang dengan persentase 19%. Jadi total keseluruhan responden sebanyak 41 orang.

## 3. Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

**Tabel 4.1.3**

### Jenjang Pendidikan Responden Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara



(Sumber: Output Hasil Olahan SEM PLS, 2024)

Berdasarkan data tabel diatas, menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini paling banyak dengan jenjang pendidikan S-1 sebanyak 31 orang

dengan persentase 75,61%. Responden dengan jenjang pendidikan S-2 sebanyak 10 orang dengan persentase 24,39%.

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Analisis Model Pengukuran (Outer Model)

Uji validitas dan uji realibilitas merupakan dua pengujian pada tahap ini. Uji Validitas bertujuan untuk menentukan apakah variabel memenuhi syarat untuk melanjutkan penelitian.

Indikator merupakan perwujudan dari variabelnya yang digunakan dalam penelitian ini dalam evaluasi pengujian outer model. *Discriminant Validity* merupakan evaluasi pengukuran indikator dalam pengujian outer model yang digunakan untuk menguji validitas Nilai outer loading factor untuk setiap indikator pada variabel diperoleh dari pengujian *Convergent Validity*. Nilai cross loading diperoleh dari pengujian *Discriminant Validity*. *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* merupakan 2 evaluasi dalam menguji reliabilitas pada saat pengukuran indikator. Perhitungan dengan cara calculate menggunakan prosedur Path Algorithm dalam smartPLS bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi dari outer model.

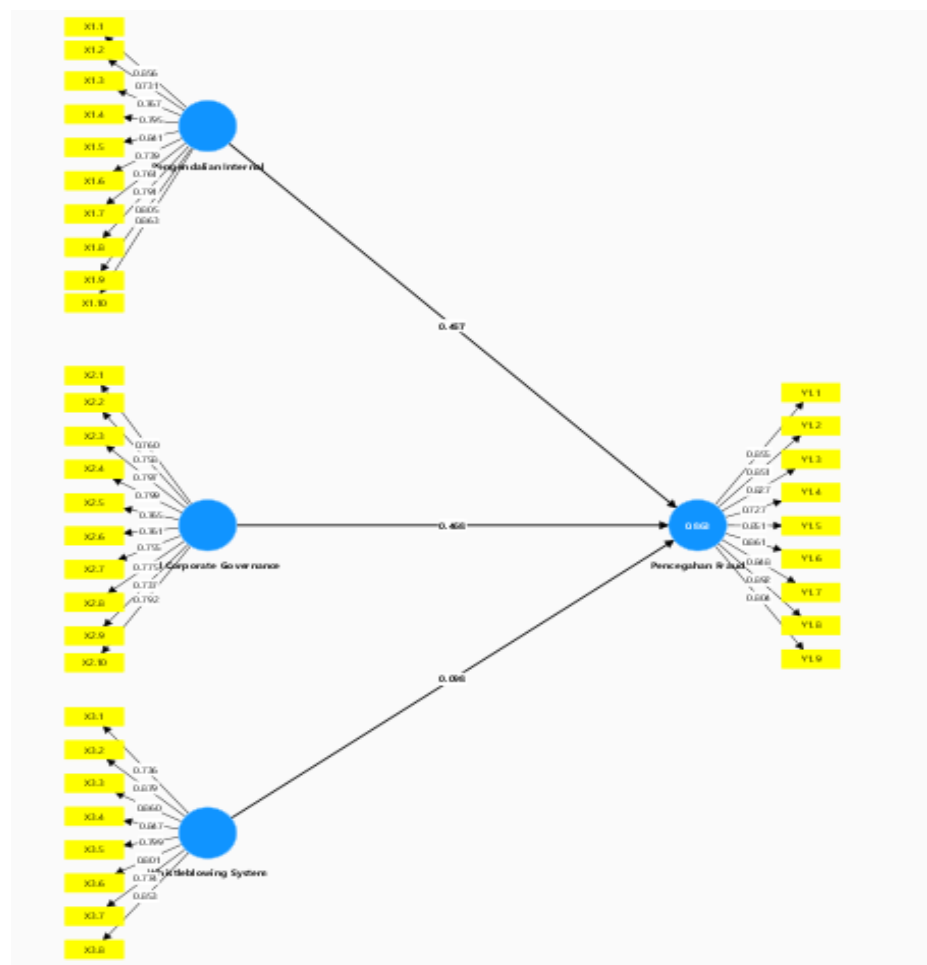
#### A. Uji Validitas

##### 1. *Loading Factor*/ Outer Loading

Validitas konvergen merupakan bagian dari *measurement model* (model pengukuran) yang dalam SEM-PLS biasanya disebut sebagai outer model sedangkan dalam covariance-based SEM disebut *confirmatory factor analysis* (CFA) (Mahmud & Ratmono, 2013:64). Terdapat dua kriteria untuk menilai apakah outer model (model pengukuran) memenuhi syarat validitas konvergen untuk konstruk reflektif, yaitu (1) loading harus di atas 0,7 dan (2) nilai p signifikan

(<0,05) (Hair et al., 2014). Namun dalam beberapa kasus, sering syarat loading diatas 0,7 sering tidak terpenuhi khususnya untuk kuesioner yang baru dikembangkan. Oleh karena itu, loading antara 0,40 – 0,70 harus tetap dipertimbangkan untuk dipertahankan Mahmud & Ratmono (2013:60).

Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui validitas dari hubungan antara indikator dan konstruk terhadap variabel yang mendasarinya. Nilai factor loading yang tinggi menunjukkan bahwa indikator tersebut memang menjelaskan variabel yang diukur. Menurut Yamin dan Kurniawan (2011) indikator yang memiliki loading factor antara 0.5-0.6 dapat diterima.



**Gambar 4.2.1 Outer Loading**

(Sumber: Output Hasil Olahan SEM PLS, 2024)

Menurut Ghazali (2018:25) Suatu indikator dinyatakan memenuhi convergent validity dalam kategori baik juga dilihat dari nilai loading factor/Outer loading, yaitu loading factor  $>0.7$ . Dengan demikian, indikator-indikator yang digunakan valid karena telah memenuhi kriteria loading factor. Selanjutnya dilakukan pengujian validitas berdasarkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE).

**Tabel 4.2.1**  
**Pengujian Validitas berdasarkan Average Variance Extracted (AVE)**

| Variabel                              | Average Variance Extracted (AVE) |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Pengendalian Internal (X1)            | 0,634                            |
| <i>Good Corporate Governance</i> (X2) | 0,593                            |
| <i>Whistleblowing System</i> (X3)     | 0,672                            |
| Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)           | 0,699                            |

(Sumber: Output Hasil Olahan SEM PLS, 2024)

Menurut Ghazali (2018:25), Uji *convergent validity* dapat dilihat dari nilai AVE dengan nilai pembatasan yaitu 0,5. Berdasarkan tabel 4.2.1 diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai  $AVE > 0.5$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel memenuhi syarat kriteria AVE. Artinya pengendalian internal, *good corporate governance* dan *whistleblowing system* yang semakin baik akan diikuti dengan pencegahan kecurangan yang baik pula.

## 2. Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan dari moden pengukuran dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan pendekatan *Fornell-Larcker. Rule of thumb* yang digunakan dalam uji validitas diskriminan adalah dengan pendekatan *Fornell-Larcker*. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar dari ukuran konstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkan konstruk laten memprediksi ukuran blok dari pada ukuran blok lainnya.

**Tabel 4.2.2**  
**Pengujian Validitas Diskriminan**

| Variabel                                     | Pengendalian Internal | <i>Good Corporate Governance</i> | <i>Whistleblowing System</i> | Pencegahan <i>Fraud</i> |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Pengendalian Internal (X1)</b>            | 0,796                 |                                  |                              |                         |
| <b><i>Good Corporate Governance</i> (X2)</b> | 0,700                 | 0,770                            |                              |                         |
| <b><i>Whistleblowing System</i> (X3)</b>     | 0,615                 | 0,767                            | 0,820                        |                         |
| <b>Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)</b>           | 0,845                 | 0,864                            | 0,739                        | 0,836                   |

(Sumber: Output Hasil Olahan SEM PLS, 2024)

Pada pengujian validitas diskriminan, nilai akar kuadrat AVE dari suatu variabel laten, dibandingkan nilai korelasi antara variabel laten tersebut dengan variabel laten lainnya. Diketahui nilai akar AVE dari untuk setiap variabel laten, lebih besar dibandingkan nilai korelasi antara variabel laten tersebut dengan variabel laten lainnya. Sehingga disimpulkan telah memenuhi syarat validitas diskriminan.

### **B. Uji Realibilitas**

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi internal alat ukur, suatu konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *composite reliability* atau *cronbach's alpha*  $> 0,7$ . Selanjutnya hasil pengujian *composite reliability* atau *cronbach's alpha* disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.2.3**  
**Composite Reliability dan Cronbach's Alpha**

| Variabel | Composite Reliability | Cronbach's Alpha | Kriteria | Keterangan |
|----------|-----------------------|------------------|----------|------------|
| X1       | 0,948                 | 0,940            | $> 0,7$  | Valid      |
| X2       | 0,960                 | 0,954            | $> 0,7$  | Valid      |
| X3       | 0,961                 | 0,956            | $> 0,7$  | Valid      |
| Y        | 0,971                 | 0,966            | $> 0,7$  | Valid      |

(Sumber: Output Hasil Olahan SEM PLS, 2024)

Berdasarkan tabel 4.2.3, menunjukkan bahwa hasil pengujian *cronbach's alpha* atau *composite reliability* menunjukkan bahwa nilai reliabilitas masing-masing variabel laten adalah reliabel karena telah memenuhi kriteria *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Nilai yang dihasilkan dari konstruk Pengendalian Internal (X1), *Good Corporate Governance* (X3), *Whistleblowing System* (X3) dan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Y) adalah  $> 0,7$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

#### 4.2.2 Analisis Model Struktural (Inner Model)

Pengertian R-Square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi (endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen). Ini berguna untuk memprediksi apakah model adalah baik/buruk (Juliandi 2018, hal.79). Kriteria dari R-Square (Juliandi, 2018) adalah :

1. Jika nilai  $R^2$  (Adjusted) = 0,75  $\rightarrow$  Model adalah substansi (kuat).
2. Jika nilai  $R^2$  (Adjusted) = 0,50  $\rightarrow$  Model adalah moderate (sedang).
3. Jika nilai  $R^2$  (Adjusted) = 0,25  $\rightarrow$  Model adalah buruk (lemah)

##### a. Koefisien Determinasi (R-Square)

Tahap pengujian R-Square memiliki tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Terdapat kriteria R-Square untuk variabel laten dependen (terikat) adalah 0.75, 0.50, 0.25 berarti kriteria nilai tersebut dapat dikatakan model kuat, sedang dan lemah (Hair et al., 2014). Hasil pengujian  $R^2$  dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2.4**  
**Nilai Koefisien Determinasi (R-Square)**

| Variabel                    | R-Square | R-Square Adjusted |
|-----------------------------|----------|-------------------|
| PENCEGAHAN <i>FRAUD</i> (Y) | 0,863    | 0,852             |

(Sumber: Output Hasil Olahan SEM PLS, 2024)

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Nilai *R-Square* pengaruh secara bersama-sama atau simultan X1 X2 dan X3 terhadap Y adalah sebesar 0,863 dengan nilai *Adjusted R-Square* 0,852. Maka dapat dijelaskan bahwa semua konstruk exogen (X1 X2 dan X3) secara serentak mempengaruhi Y sebesar 0,863 atau 86,3%. Oleh karena *Adjusted R-Square* diatas 70% maka pengaruh semua konstruk eksogen X1 X2 dan X3 terhadap Y termasuk kuat (substansi).

b. F-Square

*F-square* dilakukan untuk mengetahui kebaikan model dengan menilai dampak relatif dari variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Kriteria pengukurannya adalah jika nilai  $f^2$  lebih besar atau sama dengan 0,02 dapat dikategorikan terdapat pengaruh yang lemah/kecil atau disebut *Small Effect* dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Jika nilai  $f^2$  lebih besar atau sama dengan 0,15 dapat dikategorikan terdapat pengaruh yang moderat/ sedang atau biasa disebut *Medium effect* dari variabel eksogen terhadap variabel endogen, dan nilai  $f^2$  lebih besar atau sama dengan 0,35 dapat dikategorikan terdapat pengaruh yang kuat/ besar atau disebut *Large Effect* dari variabel eksogen terhadap variabel endogen (Hair et al., 2014). Nilai *f-square* pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.2.5**  
**Nilai F-Square**

| Variabel                  | X1 | X2 | X3 | Pencegahan Fraud |
|---------------------------|----|----|----|------------------|
| PENGENDALIAN INTERNAL     |    |    |    | 0,754            |
| GOOD CORPORATE GOVERNANCE |    |    |    | 0,525            |
| WHISTLEBLOWING SYSTEM     |    |    |    | 0,028            |
| PENCEGAHAN FRAUD          |    |    |    |                  |

(Sumber: Output Hasil Olahan SEM PLS, 2024)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pengujian 4.2.5 diatas diketahui bahwa:

- a. Pengaruh audit internal terhadap pencegahan *fraud* memiliki nilai  $f^2$  sebesar 0,754 mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang (kuat).
- b. Pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* memiliki nilai  $f^2$  sebesar 0,525 mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang (kuat).
- c. Pengaruh kualitas audit terhadap pencegahan *fraud* memiliki nilai  $f^2$  sebesar 0,028 mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang (lemah).

#### 4.2.3 Uji Hipotesis

Tahapan selanjutnya adalah pembuktian hipotesis dengan *Bootstrapping* PLS SEM *Direct Effects* dengan kriteria untuk pengujian hipotesis pengaruh langsung (*direct effect*):

1. Koefisien jalur (*path coefficient*):

- a. Jika nilai koefisien jalur (*path coefficient*) adalah positif, maka pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain adalah serah, artinya jika nilai suatu variabel meningkat/naik, maka variabel lainnya juga meningkat/naik

- b. Jika nilai koefisien jalur (*path coefficient*) adalah negatif, maka pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain adalah berlawanan arah, jika nilai suatu variabel meningkat/naik, maka nilai variabel lainnya akan menurun/rendah.
2. Nilai probabilitas/signifikan (*p-values*):
- a. Jika nilai *p-values* < 0,05, maka pengaruhnya adalah signifikan.
  - b. Jika nilai *p-values* > 0,05, maka pengaruhnya adalah tidak signifikan (Juliandi, 2018).

Hasil pengujian *Path Coefficient* dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2.6**  
**Pengujian Signifikan Pengaruh Langsung**

| VARIABEL | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | T Statistic ( o/STDEV ) | P Values |
|----------|---------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------|
| X1 → Y   | 0,457               | 0,449           | 0,124                      | 3,682                   | 0,000    |
| X2 → Y   | 0,468               | 0,469           | 0,126                      | 3,720                   | 0,000    |
| X3 → Y   | 0,098               | 0,108           | 0,109                      | 0,900                   | 0,368    |

(Sumber: Output Hasil Olahan SEM PLS, 2024)

Berdasarkan hasil pengujian *path coefficient* menunjukkan bahwa:

- X1 → Y: Koefisien jalur = 0,457 dan *P-Values* = 0,000, artinya, pengaruh X1 terhadap Y adalah positif dan signifikan.
- X2 → Y: Koefisien jalur = 0,468 dan *P-Values* = 0,000, artinya, pengaruh X2 terhadap Y adalah positif dan signifikan.
- X3 → Y: Koefisien jalur = 0,098 dan *P-Values* = 0,368, artinya, pengaruh X3 terhadap Y adalah negatif dan tidak signifikan.

### 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

#### 4.3.1 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* yang dinilai dengan koefien jalur Nilai probabilitas (*P-Values*) yang didapat sebesar  $0,000 > 0,05$ . Artinya pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* memberikan pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian internal akan diikuti dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) yang baik pula.

Menurut (Putri, 2016) pengendalian internal yaitu representasi dari semua kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suatu organisasi, segala proses yang diterapkan oleh dewan komisaris dan ditunjukkan guna untuk pencapaian operasional organisasi yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Dengan demikian, adanya pengendalian internal yang efektif yaitu pada saat mengambil keputusan selalu mempertimbangkan nilai-nilai etika yang berlaku, melaksanakan kewenangan dan kegiatan yang sesuai, menentukan tujuan organisasi yang jelas, serta hubungan komunikasi antar pegawai dan pemisahan tugas yang jelas. Sehingga pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan dapat mencegah terjadinya *fraud*. Variabel pengendalian internal diukur dengan lima indikator yaitu lingkup pekerjaan, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Indra Firmansyah, 2020; (Marfiana & Gunarto, 2021); (Nugroho & Afifi, 2022) dan (Kusumoaji & Aris,

2023) yang menyatakan bahwa ada hubungan positif yang moderat antara pengendalian internal dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) dan secara statistik menunjukkan signifikan (nyata). Artinya sistem pengendalian internal yang terdapat didalam perusahaan/institusi sangat mempengaruhi tingkat kecurangan yang terdapat didalam suatu perusahaan atau institusi.

#### **4.3.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan Kecurangan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* yang dinilai dengan koefisien jalur nilai probabilitas (P-Values) yang didapat sebesar  $0,001 > 0,05$ . Artinya pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* memberikan pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik *good corporate governance* akan diikuti dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) yang baik pula.

Gusnardi (2015 :134) mengatakan bahwa tindakan kecurangan (*fraud*) dapat diminimumkan dengan penerapan *good corporate governance*. Secara umum terdapat tiga alat pencegahan kecurangan yaitu: *good corporate governance*, pimpinan organisasi yang baik (bersih), dan penerapan pengendalian internal. Dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya suatu pencegahan *fraud* tergantung bagaimana penerapan *good corporate governance* yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan. Transparasi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan, dan kewajaran adalah prinsip-prinsip *good corporate governance* yang memiliki hubungan sebab akibat dimana penerapan harus sesuai atau sejalan bilamana ada dari prinsip-prinsip *good corporate governance* tidak jalan ataupun

tidak diterapkan maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pencegah *fraud* yang dilakukan tidak akan maksimal.

Hasil penelitian ini didukung oleh (Medury, 2018); (Nugroho & Afifi, 2022) dan (Rahmadani & Sugiarto, 2023) teori yang menyatakan bahwa *good corporate governance* akan mengurangi resiko penyalahgunaan atau pencegahan kecurangan. Ini berarti pelaksanaan *good corporate governance* mampu mencegah terjadinya kecurangan, karena setiap prinsip *good corporate governance* selalu berkaitan dengan sifat keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggung jawab yang jelas dan adanya kontrol. Artinya *good corporate governance* yang terdapat didalam perusahaan/institusi sangat mempengaruhi tingkat kecurangan yang terdapat didalam suatu perusahaan atau institusi.

#### **4.3.3 Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud***

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* yang dinilai dengan koefien jalur Nilai probabilitas (*P-Values*) yang didapat sebesar  $0,368 < 0,05$ . Artinya pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan, sehingga hipotesis ditolak.

Belum diterapkannya *whistleblowing system* pada inspektorat provinsi sumatera utara memungkinkan banyak pegawai yang tidak mengetahui tentang prosedur pelaporan dan adanya keraguan akan kerahasiaan identitas pelapor yang dapat mengurungkan niat untuk melaporkan kecurangan. *Whistleblowing* juga berkaitan dengan kepercayaan *whistleblower* bahwa melapor melalui *whistleblowing system* merupakan tindakan yang relevan dan tepat (Pittroff, 2014) dalam (Wardah et al., 2022). Sehingga pengelola dapat memberikan jaminan

keamanan bagi pelapor kecurangan agar pelapor merasa percaya untuk melapor ke whistleblowing system. Pihak Inspektorat diharapkan dapat mendukung semua orang untuk melaporkan tindakan pelanggaran peraturan melalui pemahaman yang baik mengenai pentingnya whistleblowing system sebagai saluran pelaporan fraud. Hal ini dilakukan agar terciptanya keyakinan yang memadai untuk melapor pada whistleblowing system agar dapat mencegah kecurangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Anlilua & Rusmita, 2023); (Qorirah & Syofyan, 2024); (Wardah et al., 2022) dan (Indriyani et al., 2023) yang menyatakan *Whistleblowing System* terhadap pencegahan *fraud* adalah negatif dan tidak signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian (Destiyana et al., 2024) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengendalian internal, *good corporate governance* dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan dan pembahasan dari hasil penelitian di bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis diterima dengan Pengendalian Internal ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (Y) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Sehingga dapat dijelaskan bahwa apabila pengendalian internal dalam perusahaan atau institusi sudah berjalan dengan baik, maka pencegahan *fraud* juga akan semakin baik.
2. Hipotesis diterima dengan *Good Corporate Governance* ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (Y) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Sehingga dapat dijelaskan bahwa apabila *good corporate governance* dalam perusahaan atau institusi sudah berjalan dengan baik, maka pencegahan *fraud* juga baik.
3. Hipotesis ditolak dengan *Whistleblowing System* ( $X_3$ ) tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (Y) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Belum diterapkannya *whistleblowing system* pada inspektorat provinsi sumatera utara memungkinkan banyak pegawai yang tidak mengetahui tentang prosedur pelaporan dan adanya keraguan akan

kerahasiaan identitas pelapor yang dapat mengurungkan niat untuk melaporkan kecurangan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan hipotesis yang dilakukan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan lebih banyak sampel yang dapat diambil sehingga hasil yang diperoleh dapat mewakili keadaan secara keseluruhan.
2. Disarankan dapat memberikan pelatihan atau sosialisasi kepada pegawai pelaksana *whistleblowing* system Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terkait hal-hal yang berkaitan dengan *whistleblowing* system seperti pelatihan teknik investigasi, sosialisasi saluran internal dan lain sebagainya agar melaporkan tindakan kecurangan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). Partial Least Square (PLS) - Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis (D. Prabantini, Ed.; 1st ed.). C.V Andi Offset.
- Agoes, S. (2018). Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik (5th ed.). Auditing. Jakarta: Salemba Empat.
- Akhtar, M., Kartini, K., & Ayu Damayanti, R. (2022). Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Pendeteksian Kecurangan (Fraud). *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15(2) 132–142. <https://doi.org/10.26487/akrual.v15i2.21728>
- Andriani, R., Maisyarah, R., & Siregar, O. K. (2024). Pencegahan Fraud Pada PT PLN (Persero). In *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)* (Vol. 7, Issue 1).
- Bramasto, A., Anggadini, D., Hasanah, U., & Azizah, N. N. (2022). Pencegahan Kecurangan Dengan Audit Internal Dan Pengendalian Internal. In *Jurnal Akuntansi* 11(1). <https://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/Akuntansi>.
- Coso. (2013). Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary. Durham.
- Destiyana, A., Sabilila Yassarah, F., Marinda Machdar, N., Bekasi, K., & Barat, J. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, Pengendalian Internal, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 27–39. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2528>
- Florid, MI, Hendra, RF and Pupung Purnamasari "The Influence Of Accounting Information Systems, Internal Control Systems And The Implementation Of Good Corporate Governance In Efforts To Prevent Fraud." 2023, [return.publikasikupublisher.com](https://return.publikasikupublisher.com), <https://return.publikasikupublisher.com/index.php/return/article/view/66>
- Ghozali, Imam. 2008. Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafsah, & Harahap, K. (n.d.). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Whistleblowing System Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. In *SiNTESa CERED Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora* (Vol. 2021).
- Harmana, I. M. D. (2023). Meningkatkan Nilai Perusahaan Melalui Struktur Modal Dan Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 165–173. <https://doi.org/10.38043/jiab.v8i2.5103>
- Hanum, Z. (2019). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Pantai Labu Pekan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pendidikan Akuntansi* 2(3), 237–242. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v2i3.3990>
- Hariyani, E., Supriono, S., Hanif, R. A., Silalahi, S. P., & Wiguna, M. (2024). Determinants influencing fraud detection: Role of internal auditors' quality. *Problems and Perspectives in Management*, 22(2), 51–60. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(2\).2024.05](https://doi.org/10.21511/ppm.22(2).2024.05)
- Juliandi. A., Irfan, Manurung, S. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep Dan Aplikasi: Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri. Jl Kapten Mukhtar Basri No.3 Medan: UMSU PRESS.
- Karolina, P. E., Ladewi, Y., & Aprianto. (2022). Pengendalian Intern Salah Satu Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(3), 217–228.
- Kuntadi, C., Puspita, B. A., & Taufik, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pencegahan Kecurangan: Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kesesuaian Kompensasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(5), 530–539.

- Kurniawan, P. C., & Izzaty, K. N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud. *Eonbank: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 55–60. <https://doi.org/10.35829/eonbank.v1i1>.
- Kusumoaji, M. F., & Aris, M. A. (2023). The Effect Of The Role Of Internal Audit, Good Corporate Governance And Internal Control On Fraud Prevention (Empirical Study Of Rural Credit Banks In Surakarta) Pengaruh Peran Audit Internal, Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap P. In *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 4, Issue 5). <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Langoday, K. S. M. (2021). Pengaruh Whistleblowing System dan Perilaku Etis terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 103–110.
- Lestari, H., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Internal Kontrol, Audit Internal, Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(7), 706–716. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i7.690>
- Lubis, H. Z., Sari, M., Ramadhany, A. A., Ovami, D. C., & Brutu, I. R. (2024). Effect of internal audit, internal control, and audit quality on fraud prevention: Evidence from the public sector in Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 22(2), 40–50. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(2\).2024.04](https://doi.org/10.21511/ppm.22(2).2024.04)
- Mahendra, K. Y., Erna Trisna Dewi, A. A. ., & Rini, G. A. I. S. (2021). Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Bank Bum di Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(1), 1–4. <https://doi.org/10.22225/jraw.2.1.2904.1-4>
- Mahdi, S. A., & Darwis, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Aparat Pemerintah Desa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradapan*, 6(2), 184–198.
- Naufal, A. (2023). Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Good Corporate Governance, Budaya Organisasi, Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Pada PT.X). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 1–9
- Nugroho, D. H., & Afifi, Z. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(3), 301–316. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i3.42>
- Rambe, I., & Octaviani, I. (2024). The Role Of Internal Auditors in Preventing and Detecting Fraud at PTPN IV. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 5(1).
- Priandini, E. A. M., & Biduri, S. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Moralitas Individu, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDes di Kabupaten Sidoarjo. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(4), 1–13. <https://doi.org/10.47134/innovative.v2i4.6>.
- Rahmadani, S., & Sugiarto. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). *STIE Cendekia Karya Utama*, 47–64.
- Rahmawati, E., & Tarjo (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Law and Business*, 1(1), 1 -8.
- Sekaran, Uma & Bougie, Roger. (2013). Research methods for business: A skill Building approach sixth edition. Chichester: Wiley.
- Supriyanto, D. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang dan Jasa: Sistem Pengendalian Internal, E-Procurement, Sistem

- dan Prosedur. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 131–141. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2.1200>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman Sugita, S. (n.d.). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Fraud pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI <http://sosains.greenvest.co.id>
- Thahir, R. R., & Tajib, E. (2023). Pengaruh Job Satisfaction, Fair Treatment, Cooperativeness terhadap The Whistleblowing Pada Karyawan Kantor Pusat PT.TH Indo Plantations di Jakarta. *Journal of Comprehensive Science*, 2.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Salemba Empat: Jakarta.
- Wardah, Z., Carolina, A., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Internal Control, Leadership dan Budaya Organisasi terhadap Fraud Prevention. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(2), 233–247. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i2.49346>
- Yanti, S. R., & Hidayah, N. (2023). Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance, Kompetensi Auditor Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Praktik Perbankan dengan Whistleblowing System Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(2), 974–985. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2>.

## LAMPIRAN

### KUESIONER PENELITIAN

#### PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*)

Kepada Bapak/Ibu/Saudara/ (i) Responden

Responden yang terhormat, Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya Anjlia D Nasution mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Oleh karena itu saya bermaksud melakukan penelitian pada Instansi Kepada Bapak/Ibu/Saudara/ (i) bekerja.

Saya memohon kesediaan Kepada Bapak/Ibu/Saudara/ (i) untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini. Saya harap Kepada Bapak/Ibu/Saudara/ (i) menjawab dengan leluasa dan sesuai dengan apa yang dipersiapkan. Kesediaan Kepada Bapak/Ibu/Saudara/ (i) mengisi kuesioner ini adalah bantuan yang tak ternilai bagi saya. Semoga penelitian ini dapat berkontribusi positif bagi saya dan kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas perhatian dan bantuannya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Nama :  
 Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan  
 Usia : ☐ 20-30 tahun ☐ 41-50 tahun  
           ☐ 31-40 tahun ☐ >51 tahun

Jenjang Pendidikan : ☐ SMA ☐ S1  
                                  ☐ D3 ☐ S2

Berilah tanda check list (√) pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian Anda, dimana:

**1 = Sangat Tidak Memadai (STM)**

**2 = Tidak Memadai (TM)**

**3 = Cukup Memadai (CM)**

**4 = Memadai (M)**

**5 = Sangat Memadai (SM)**

#### VARIABEL PENGENDALIAN INTERNAL

| No                                | Pernyataan                                                                                                    | SM | M | CM | TM | STM |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|-----|
| <b>A. Lingkungan Pengendalian</b> |                                                                                                               |    |   |    |    |     |
| 1.                                | Inspektorat harus selalu memperhatikan nilai-nilai etika yang berlaku dalam setiap pengambilan keputusan      |    |   |    |    |     |
| 2.                                | Inspektorat menunjukkan komitmen selama proses rekrutmen sesuai dengan tujuan perusahaan.                     |    |   |    |    |     |
| <b>B. Penilaian Risiko</b>        |                                                                                                               |    |   |    |    |     |
| 3.                                | Inspektorat menetapkan tujuan organisasi yang jelas untuk setiap tujuan untuk melaksanakan penilaian risiko.  |    |   |    |    |     |
| 4.                                | Inspektorat mengidentifikasi adanya perubahan yang mungkin berdampak signifikan terhadap pengendalian intern. |    |   |    |    |     |
| <b>C. Aktivitas Pengendalian</b>  |                                                                                                               |    |   |    |    |     |
| 5.                                | Inspektorat secara berkala merevisi sistem                                                                    |    |   |    |    |     |

|                                    |                                                                                                |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                    | informasi sesuai dengan kemajuan teknologi.                                                    |  |  |  |  |  |
| D. Komunikasi dan Informasi        |                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 6.                                 | Inspektorat dapat dengan benar mengidentifikasi dan mencatatat semua transaksi yang sah.       |  |  |  |  |  |
| 7.                                 | Inspektorat dapat mengklasifikasikan transaksi yang sesuai.                                    |  |  |  |  |  |
| E. Aktivitas Pengawasan/Pemantauan |                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 8                                  | Inspektorat melakukan pelatihan kepada karyawan agar dapat bekerja sesuai dengan ketentuan.    |  |  |  |  |  |
| 9                                  | Inspektorat harus dapat memantau setiap aktivitas yang terjadi pada sistem.                    |  |  |  |  |  |
| 10                                 | Inspektorat secara berkala melakukan audit internal untuk mendeteksi kemungkinan adanya fraud. |  |  |  |  |  |

Sumber: Listiani, 2017

#### VARIABEL GOOD CORPORATE GOVERNANCE

| No                                     | Pernyataan                                                                                                                       | SM | M | CM | TM | STM |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|-----|
| A. Keterbukaan (transparency)          |                                                                                                                                  |    |   |    |    |     |
| 1                                      | Saya bertanggung jawab atas tiap pengambilan keputusan yang diambil secara transparan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku. |    |   |    |    |     |
| B. Akuntabilitas (Accountability)      |                                                                                                                                  |    |   |    |    |     |
| 2.                                     | Saya bekerja selalu mengikuti prosedur kerja yang ada dan memenuhi standar kerja yang ditetapkan oleh perusahaan.                |    |   |    |    |     |
| C. Pertanggungjawaban (Responsibility) |                                                                                                                                  |    |   |    |    |     |
| 3.                                     | Saya memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan produktivitas kerja untuk kepentingan perusahaan                            |    |   |    |    |     |
| 4.                                     | Saya bekerja secara maksimal untuk meningkatkan nilai perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan                                |    |   |    |    |     |
| 5.                                     | Saya bekerja secara profesional sesuai dengan jabatan yang diberikan oleh atasan                                                 |    |   |    |    |     |
| 6.                                     | Saya melakukan tugas sesuai dengan implementasi kebijakan dan keputusan dari atasan                                              |    |   |    |    |     |
| D. Independensi (Independency)         |                                                                                                                                  |    |   |    |    |     |
| 7.                                     | Saya bekerja dengan totalitas penuh pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan                                                 |    |   |    |    |     |
| 8.                                     | Saya melakukan tiap tugas dari atasan sesuai dengan etika dan untuk kepentingan perusahaan                                       |    |   |    |    |     |
| E. Kewajaran (Fairness)                |                                                                                                                                  |    |   |    |    |     |
| 9.                                     | Komitmen kerja harus dimiliki oleh tiap pegawai untuk mendukung kelangsungan perusahaan di masa mendatang                        |    |   |    |    |     |
| 10.                                    | Tiap pegawai mempunyai komitmen yang kuat dalam dirinya untuk memberikan hasil optimal bagi perusahaan                           |    |   |    |    |     |

Sumber: Pahlevi, 2018

#### VARIABEL WHISTLEBLOWING SYSTEM

| No. | Pernyataan | SM | M | CM | TM | STM |
|-----|------------|----|---|----|----|-----|
|-----|------------|----|---|----|----|-----|



|    |                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 9. | Struktur kelembagaan Inspektorat telah dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan kekuasaan |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

Sumber: Bramasto et al., 2022

Secara lebih rinci, jumlah kasus korupsi di setiap provinsi, termasuk di antaranya potensi nilai kerugian negara, suap-menyuap, pungutan liar, dan pencucian uang, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2023**

| Provinsi            | Jumlah     | Kerugian Negara (Rp)      | Suap-Menyuap (Rp)      | Pungutan Liar (Rp)    | Pencucian Uang (Rp)    |
|---------------------|------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Jawa Timur          | 64         | 172.721.277.450           | 16.341.792.929         | 1.638.575.000         | -                      |
| Sumatera Utara      | 54         | 91.309.219.490            | -                      | 699.000.000           | -                      |
| Jawa Tengah         | 47         | 207.728.957.383           | 6.445.000.000          | 2.512.500.000         | -                      |
| Sulawesi Selatan    | 46         | 145.780.302.928           | 57.366.892.000         | 200.000.000           | 57.366.892.000         |
| NTT                 | 37         | 60.634.844.544            | -                      | -                     | -                      |
| Aceh                | 36         | 169.671.846.654           | -                      | -                     | -                      |
| Jawa Barat          | 36         | 116.767.270.479           | 2.160.000.000          | -                     | -                      |
| Sumatera Selatan    | 31         | 213.200.145.041           | -                      | 1.281.500.000         | -                      |
| Bengkulu            | 29         | 15.820.477.260            | 2.205.000.000          | 1.247.000.000         | -                      |
| Riau                | 26         | 163.566.280.894           | 26.100.000.000         | 555.000.000           | 1.200.000.000          |
| Lampung             | 27         | 76.218.674.097            | 120.000.000            | 195.200.000           | -                      |
| Nasional            | 27         | 17.931.022.960.904        | 228.964.806.137        | -                     | 44.994.806.137         |
| Sulawesi Tenggara   | 26         | 5.731.941.487.874         | 3.100.000.000          | -                     | -                      |
| Maluku              | 26         | 48.725.415.865            | 400.000.000            | -                     | -                      |
| Jambi               | 20         | 413.734.687.001           | -                      | 80.700.000            | -                      |
| Kalimantan Tengah   | 19         | 38.371.759.813            | -                      | -                     | -                      |
| Kalimantan Timur    | 18         | 187.006.919.002           | 1.400.000.000          | -                     | -                      |
| NTB                 | 18         | 63.466.126.820            | 8.600.000.000          | 100.000.000           | -                      |
| Kalimantan Barat    | 17         | 26.539.711.934            | -                      | -                     | -                      |
| Sumatera Barat      | 16         | 20.575.429.655            | -                      | -                     | -                      |
| Banten              | 16         | 104.575.165.871           | 400.000.000            | 975.000.000           | 8.530.120.000          |
| Sulawesi Utara      | 16         | 75.941.690.947            | 11.750.000             | -                     | -                      |
| Kepulauan Riau      | 15         | 375.376.827.139           | -                      | -                     | -                      |
| Bali                | 14         | 161.395.820.150           | 46.200.000.000         | 672.228.000           | -                      |
| Kalimantan Selatan  | 13         | 15.954.987.138            | 65.900.000             | -                     | -                      |
| Sulawesi Tengah     | 13         | 12.539.933.746            | -                      | -                     | -                      |
| Sulawesi Barat      | 12         | 16.753.997.073            | -                      | -                     | -                      |
| Kep Bangka Belitung | 11         | 20.737.404.744            | -                      | -                     | -                      |
| DKI Jakarta         | 10         | 1.419.984.665.138         | -                      | -                     | -                      |
| Maluku Utara        | 10         | 11.974.390.808            | -                      | -                     | -                      |
| Papua Barat         | 8          | 58.069.940.619            | -                      | -                     | -                      |
| Papua               | 8          | 130.363.762.921           | 2.595.507.228          | -                     | 144.670.000.000        |
| DI Yogyakarta       | 7          | 40.546.713.838            | 18.000.000.000         | -                     | -                      |
| Gorontalo           | 7          | 30.877.319.015            | -                      | -                     | -                      |
| Kalimantan Utara    | 4          | 18.007.442.345            | -                      | -                     | -                      |
| Papua Barat Daya    | 4          | 7.630.907.978             | 1.800.000.000          | -                     | -                      |
| Papua Selatan       | 2          | 2.991.003.190             | -                      | -                     | -                      |
| Papua Tengah        | 1          | 14.261.210.341            | -                      | -                     | -                      |
| Papua Pegunungan    | 0          | -                         | -                      | -                     | -                      |
| <b>TOTAL</b>        | <b>791</b> | <b>28.412.786.978.089</b> | <b>422.276.648.294</b> | <b>10.156.703.000</b> | <b>257.961.818.137</b> |

(Sumber: LHP Tren Penindakan Kasus Korupsi ICW)

Secara lebih rinci, jumlah kasus korupsi di setiap provinsi, termasuk di antaranya potensi nilai kerugian negara, suap-menyuap, pungutan liar, dan pencucian uang, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2022**

| Provinsi            | Jumlah     | Kerugian Negara           | Suap dan Pungli        | Pencucian Uang         |
|---------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Jawa Timur          | 57         | 54.017.332.070            | 37.972.800.000         | -                      |
| Jawa Barat          | 33         | 197.946.272.982           | 9.817.000.000          | -                      |
| NTT                 | 30         | 22.792.268.183            | 2.415.000.000          | -                      |
| Aceh                | 28         | 88.449.238.949            | -                      | -                      |
| Sumatera Selatan    | 28         | 50.478.205.863            | 392.300.000            | 700.000.000.000        |
| Riau                | 25         | 4.958.300.679.272         | 3.225.000.000          | -                      |
| Bengkulu            | 24         | 73.799.748.211            | 311.700.000            | -                      |
| Sumatera Utara      | 19         | 37.037.689.820            | 1.144.000.000          | -                      |
| Jawa Tengah         | 19         | 59.584.129.210            | 18.582.207.750         | -                      |
| Kalimantan Barat    | 18         | 55.791.594.825            | 572.000.000            | -                      |
| Sulawesi Tenggara   | 17         | 10.976.586.239            | 2.400.000.000          | 7.780.000.000          |
| Bali                | 17         | 301.230.100.367           | 4.700.000.000          | 7.000.000.000          |
| Maluku Utara        | 17         | 17.488.855.703            | -                      | -                      |
| Kalimantan Tengah   | 15         | 29.796.737.765            | -                      | -                      |
| Sulawesi Utara      | 15         | 145.372.810.268           | 500.000.000            | -                      |
| Nasional            | 15         | 34.866.818.950.819        | 10.900.000.000         | -                      |
| Lampung             | 14         | 40.366.081.835            | 4.400.000.000          | -                      |
| Kep Riau            | 14         | 37.435.725.574            | 1.200.000.000          | -                      |
| Kalimantan Selatan  | 13         | 14.734.008.197            | 104.300.000.000        | -                      |
| Kalimantan Timur    | 13         | 85.511.765.914            | 5.700.000.000          | -                      |
| Sulawesi Selatan    | 13         | 67.445.217.925            | -                      | -                      |
| Sumatera Barat      | 12         | 29.405.879.288            | 25.000.000             | -                      |
| Kep Bangka Belitung | 12         | 11.034.089.103            | 7.500.000.000          | -                      |
| Papua               | 12         | 120.564.710.659           | 432.600.000.000        | -                      |
| Jambi               | 11         | 12.685.840.553            | 12.900.000.000         | -                      |
| Sulawesi Barat      | 11         | 25.966.923.737            | -                      | -                      |
| Maluku              | 11         | 35.559.124.642            | 500.000.000            | -                      |
| Banten              | 10         | 208.286.731.509           | 18.700.000.000         | -                      |
| Sulawesi Tengah     | 10         | 11.048.075.969            | 397.912.284            | -                      |
| NTB                 | 10         | 13.580.239.790            | 31.900.000.000         | -                      |
| DKI Jakarta         | 8          | 867.473.261.604           | -                      | 241.200.000.000        |
| DI Yogyakarta       | 8          | 38.430.054.081            | 397.912.284            | -                      |
| Papua Barat         | 8          | 40.869.684.138            | 800.000.000            | -                      |
| Kalimantan Utara    | 6          | 104.603.100.000           | -                      | -                      |
| Gorontalo           | 6          | 12.666.109.985            | -                      | -                      |
| <b>Total</b>        | <b>579</b> | <b>42.747.547.825.049</b> | <b>705.282.920.034</b> | <b>955.980.000.000</b> |

Secara lebih rinci, jumlah kasus korupsi di setiap provinsi, termasuk di antaranya potensi nilai kerugian negara, suap-menyuap, pungutan liar, dan pencucian uang, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2021**

| No.          | Provinsi             | Jumlah Kasus | Nilai Kerugian Negara (Rp) | Nilai Suap/ Gratifikasi/Pungli (Rp) | Nilai Pencucian Uang (Rp) |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1.           | Jawa Timur           | 42           | 308.860.104.402            | 1.433.500.000                       | -                         |
| 2.           | Jawa Barat           | 40           | 162.941.784.973            | 8.445.000.000                       | -                         |
| 3.           | Jawa Tengah          | 37           | 414.644.768.501            | 27.924.000.000                      | -                         |
| 4.           | NTT                  | 34           | 1.345.472.662.989          | -                                   | -                         |
| 5.           | Sulawesi Selatan     | 30           | 68.088.415.582             | 5.500.000.000                       | -                         |
| 6.           | Kalimantan Tengah    | 23           | 31.187.821.856             | 253.250.000                         | -                         |
| 7.           | Bali                 | 23           | 172.488.352.591            | 16.005.000.000                      | -                         |
| 8.           | Maluku               | 23           | 41.756.399.980             | -                                   | -                         |
| 9.           | Sulawesi Tengah      | 21           | 58.004.874.591             | 350.000.000                         | -                         |
| 10.          | Sumatera Utara       | 18           | 168.134.555.088            | 438.700.000                         | -                         |
| 11.          | Sulawesi Utara       | 18           | 49.449.390.494             | 9.800.000.000                       | -                         |
| 12.          | Maluku Utara         | 17           | 17.611.745.833             | -                                   | -                         |
| 13.          | Kalimantan Selatan   | 15           | 8.039.790.167              | 46.511.519.000                      | 18.900.000.000            |
| 14.          | Riau                 | 14           | 7.033.843.335              | 700.000.000                         | -                         |
| 15.          | Banten               | 14           | 10.110.700.927             | 566.000.000                         | -                         |
| 16.          | Aceh                 | 13           | 25.994.129.987             | -                                   | -                         |
| 17.          | Sumatera Selatan     | 13           | 569.579.383.785            | 11.370.000.000                      | -                         |
| 18.          | Kalimantan Barat     | 13           | 14.335.939.374             | 28.500.000.000                      | -                         |
| 19.          | Papua                | 13           | 85.685.471.675             | -                                   | -                         |
| 20.          | Lampung              | 12           | 80.047.892.656             | 2.300.000.000                       | -                         |
| 21.          | NTB                  | 12           | 830.910.692.080            | -                                   | -                         |
| 22.          | Nasional             | 12           | 23.139.422.622.806         | 43.087.500.000                      | -                         |
| 23.          | Bengkulu             | 9            | 18.308.184.809             | -                                   | 375.000.000               |
| 24.          | Papua Barat          | 9            | 25.777.720.376             | -                                   | -                         |
| 25.          | Jambi                | 8            | 15.855.261.000             | 7.000.000.000                       | -                         |
| 26.          | DKI Jakarta          | 8            | 1.203.945.562.472          | -                                   | 1.700.000.000             |
| 27.          | Sulawesi Tenggara    | 8            | 205.688.269.431            | 250.000.000                         | -                         |
| 28.          | Kep. Riau            | 7            | 254.115.467.899            | 8.121.420.000                       | -                         |
| 29.          | Sumatera Barat       | 6            | 4.649.474.200              | -                                   | -                         |
| 30.          | Sulawesi Barat       | 5            | 6.477.543.659              | -                                   | -                         |
| 31.          | Kep. Bangka Belitung | 4            | 6.515.499.746              | -                                   | -                         |
| 32.          | DI Yogyakarta        | 4            | 5.843.068.000              | -                                   | -                         |
| 33.          | Gorontalo            | 4            | 28.159.606.049             | -                                   | -                         |
| 34.          | Kalimantan Timur     | 3            | 53.400.000.000             | -                                   | -                         |
| 35.          | Kalimantan Utara     | 1            | -                          | -                                   | -                         |
| <b>Total</b> |                      | <b>533</b>   | <b>29.438.537.001.313</b>  | <b>218.555.889.000</b>              | <b>20.975.000.000</b>     |

Secara lebih rinci, jumlah kasus korupsi di setiap provinsi, termasuk di antaranya potensi nilai kerugian negara, suap-menyuap, pungutan liar, dan pencucian uang, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2020**

| No           | Provinsi             | Jumlah Kasus | Nilai Kerugian Negara | Nilai Suap/Gratifikasi | Nilai Pungutan Liar  |
|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 1            | Jawa Tengah          | 17           | Rp61,4 miliar         | Rp65 juta              | Rp686 juta           |
| 2            | Jawa Timur           | 16           | Rp139,2 miliar        | Rp550 juta             | Rp118 juta           |
| 3            | Sumatera Utara       | 13           | Rp24,5 miliar         | -                      | Rp7,5 juta           |
| 4            | Jawa Barat           | 10           | Rp6,9 miliar          | Rp120 juta             | -                    |
| 5            | Riau                 | 9            | Rp497,5 miliar        | -                      | Rp100 juta           |
| 6            | Sumatera Selatan     | 9            | Rp4 miliar            | -                      | Rp3,6 juta           |
| 7            | DKI Jakarta          | 7            | Rp17,2 triliun        | Rp400 juta             | -                    |
| 8            | Nusa Tenggara Timur  | 7            | Rp7,6 miliar          | -                      | -                    |
| 9            | Kep. Riau            | 6            | Rp1,5 miliar          | -                      | -                    |
| 10           | Sulawesi Selatan     | 6            | Rp2,5 miliar          | -                      | Rp43 miliar          |
| 11           | Kalimantan Tengah    | 5            | Rp2,9 miliar          | -                      | -                    |
| 12           | Kalimantan Timur     | 5            | Rp32 miliar           | Rp100 juta             | Rp700 juta           |
| 13           | Sulawesi Tenggara    | 5            | Rp14,9 miliar         | -                      | -                    |
| 14           | Aceh                 | 4            | Rp1,8 miliar          | -                      | -                    |
| 15           | Bali                 | 4            | Rp1,3 miliar          | -                      | -                    |
| 16           | Kep. Bangka Belitung | 4            | Rp6,4 miliar          | -                      | -                    |
| 17           | Maluku               | 4            | Rp65,9 miliar         | -                      | -                    |
| 18           | Papua                | 4            | Rp21,7 miliar         | Rp19 miliar            | -                    |
| 19           | Bengkulu             | 3            | Rp435 juta            | -                      | -                    |
| 20           | Kalimantan Selatan   | 3            | Rp2,6 miliar          | -                      | -                    |
| 21           | Lampung              | 3            | Rp5,3 miliar          | -                      | -                    |
| 22           | Maluku Utara         | 3            | Rp7,2                 | -                      | -                    |
| 23           | Nusa Tenggara Barat  | 3            | Rp178 juta            | -                      | -                    |
| 24           | Sulawesi Tengah      | 3            | Rp236 juta            | -                      | -                    |
| 25           | Sulawesi Utara       | 3            | Rp863 juta            | -                      | -                    |
| 26           | Sumatera Barat       | 3            | Rp2,8 miliar          | -                      | -                    |
| 27           | Banten               | 2            | Rp2,5 miliar          | -                      | -                    |
| 28           | Gorontalo            | 2            | -                     | -                      | -                    |
| 29           | Kalimantan Barat     | 2            | Rp11,1 miliar         | -                      | -                    |
| 30           | Sulawesi Barat       | 2            | Rp2,1 miliar          | -                      | -                    |
| 31           | Jambi                | 1            | -                     | -                      | -                    |
| 32           | Papua Barat          | 1            | Rp392 juta            | -                      | -                    |
| <b>TOTAL</b> |                      | <b>169</b>   | <b>Rp18,1 triliun</b> | <b>Rp20,2 miliar</b>   | <b>Rp44,6 miliar</b> |

Secara lebih rinci, jumlah kasus korupsi di setiap provinsi, termasuk di antaranya potensi nilai kerugian negara, suap-menyuap, pungutan liar, dan pencucian uang, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2019**

| No  | Keterangan          | Jumlah | Nilai KN       | Nilai Suap     | Nilai Pungli | Nilai Pencucian Uang |
|-----|---------------------|--------|----------------|----------------|--------------|----------------------|
| 1.  | Nasional            | 29     | Rp612,6 miliar | Rp122,3 miliar | Rp1 miliar   | Rp4,6 miliar         |
| 2.  | Jawa Barat          | 21     | Rp1,1 triliun  | Rp24,3 miliar  | Rp5 juta     | Rp51 miliar          |
| 3.  | Jawa Timur          | 19     | Rp25 miliar    | Rp4,8 miliar   | Rp808 juta   | -                    |
| 4.  | Nusa Tenggara Barat | 14     | Rp6,1 miliar   | Rp1,3 miliar   | Rp1,5 miliar | -                    |
| 5.  | Jawa Tengah         | 13     | Rp17,1 miliar  | Rp426 juta     | Rp82 juta    | -                    |
| 6.  | Aceh                | 11     | Rp65,8 miliar  | -              | -            | -                    |
|     | Sulawesi Selatan    |        | Rp18,7 miliar  | -              | Rp110 juta   | -                    |
|     | Jambi               |        | Rp111,1 miliar | -              | -            | -                    |
| 7.  | Lampung             | 10     | Rp41,8 miliar  | Rp13,9 miliar  | Rp11 juta    | -                    |
|     | Bengkulu            |        | Rp2,3 miliar   | Rp538 juta     | Rp30 juta    | -                    |
|     | Sulawesi Tengah     |        | Rp102,7 miliar | -              | -            | -                    |
| 8.  | Sumatera Barat      | 8      | Rp8,4 miliar   | Rp493 juta     | -            | -                    |
|     | Bali                |        | Rp5,3 miliar   | Rp2 juta       | -            | Rp11 miliar          |
|     | Sumatera Utara      |        | Rp18 miliar    | Rp500 juta     | Rp180 juta   | -                    |
| 9.  | Papua Barat         | 7      | Rp8,5 miliar   | -              | -            | -                    |
|     | Riau                |        | Rp106,8 miliar | Rp3,1 miliar   | -            | -                    |
| 10. | Banten              | 6      | Rp5,7 miliar   | Rp150 juta     | Rp40 juta    | -                    |

## TABULASI DATA MENTAH

## Pengendalian Internal (X1)

[illegible]

**Good Corporate Governance (X2)**

| X2.1 | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X2.5 | X2.6 | X2.7 | X2.8 | X2.9 | X2.10 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 5    | 3    | 5    | 5    | 5    | 4    | 5    | 5    | 5    | 5     |
| 5    | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     |
| 4    | 4    | 5    | 4    | 4    | 5    | 4    | 5    | 5    | 5     |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     |
| 4    | 4    | 5    | 5    | 4    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5     |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     |
| 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 4    | 4    | 4     |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     |
| 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4     |
| 5    | 5    | 5    | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     |
| 4    | 3    | 5    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 3    | 5     |
| 4    | 5    | 5    | 5    | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     |
| 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4     |
| 4    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     |
| 5    | 4    | 5    | 4    | 5    | 4    | 4    | 4    | 4    | 5     |
| 4    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 4    | 4    | 4    | 5     |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 4    | 4    | 5    | 5    | 5     |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     |
| 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 4    | 4    | 5    | 5    | 4     |
| 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 5    | 4    | 4    | 4     |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 4    | 4    | 5     |
| 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 4    | 3    | 4     |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 4    | 5    | 4    | 4    | 5    | 5     |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     |
| 4    | 5    | 4    | 5    | 4    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5     |
| 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 5    | 4     |
| 4    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 4    | 5    | 5     |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 4    | 5    | 5    | 4    | 5     |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 4    | 4    | 5    | 5    | 5    | 5     |

### Whistleblowing System (X3)

| X3.1 | X3.2 | X3.3 | X3.4 | X3.5 | X3.6 | X3.7 | X3.8 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |

### Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Y)

| Y1.1 | Y1.2 | Y1.3 | Y1.4 | Y1.5 | Y1.6 | Y1.7 | Y1.8 | Y1.9 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5    | 5    | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |



## 1. OUTPUT OUTER MODEL

### a. Pengujian Validitas berdasarkan Loading Faktor

|       | Pengendalian Internal | Good Corporate Governance | Whistleblowing System | Pencegahan Fraud |
|-------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| X1.1  | 0.856                 |                           |                       |                  |
| X1.10 | 0.863                 |                           |                       |                  |
| X1.2  | 0.731                 |                           |                       |                  |
| X1.3  | 0.767                 |                           |                       |                  |
| X1.4  | 0.795                 |                           |                       |                  |
| X1.5  | 0.841                 |                           |                       |                  |
| X1.6  | 0.739                 |                           |                       |                  |
| X1.7  | 0.761                 |                           |                       |                  |
| X1.8  | 0.791                 |                           |                       |                  |
| X1.9  | 0.805                 |                           |                       |                  |
| X2.1  |                       | 0.760                     |                       |                  |
| X2.10 |                       | 0.792                     |                       |                  |
| X2.2  |                       | 0.758                     |                       |                  |
| X2.3  |                       | 0.797                     |                       |                  |
| X2.4  |                       | 0.799                     |                       |                  |
| X2.5  |                       | 0.765                     |                       |                  |
| X2.6  |                       | 0.761                     |                       |                  |
| X2.7  |                       | 0.755                     |                       |                  |
| X2.8  |                       | 0.775                     |                       |                  |
| X2.9  |                       | 0.737                     |                       |                  |
| X3.1  |                       |                           | 0.736                 |                  |
| X3.2  |                       |                           | 0.879                 |                  |
| X3.3  |                       |                           | 0.860                 |                  |
| X3.4  |                       |                           | 0.847                 |                  |
| X3.5  |                       |                           | 0.799                 |                  |
| X3.6  |                       |                           | 0.801                 |                  |
| X3.7  |                       |                           | 0.774                 |                  |
| X3.8  |                       |                           | 0.853                 |                  |
| Y1.1  |                       |                           |                       | 0.855            |
| Y1.2  |                       |                           |                       | 0.851            |
| Y1.3  |                       |                           |                       | 0.827            |
| Y1.4  |                       |                           |                       | 0.727            |
| Y1.5  |                       |                           |                       | 0.851            |
| Y1.6  |                       |                           |                       | 0.861            |
| Y1.7  |                       |                           |                       | 0.848            |
| Y1.8  |                       |                           |                       | 0.892            |
| Y1.9  |                       |                           |                       | 0.804            |

### b. Validitas dan Reliabilitas berdasarkan Average Variance Extracted (AVE), Composite Reliability (CR) dan Cronbach's Alpha (CA)

| Construct reliability and validity - Overview |                  |                               |                               |                                  | Copy to Excel/Word |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                               | Cronbach's alpha | Composite reliability (rho_a) | Composite reliability (rho_c) | Average variance extracted (AVE) |                    |
| X1                                            | 0.935            | 0.941                         | 0.945                         | 0.634                            |                    |
| X2                                            | 0.924            | 0.925                         | 0.936                         | 0.593                            |                    |
| X3                                            | 0.930            | 0.944                         | 0.942                         | 0.672                            |                    |
| Y                                             | 0.946            | 0.948                         | 0.954                         | 0.699                            |                    |

c. Validitas Diskriminan

| Discriminant validity - Fornell-Larcker criterion |       |       |       |       |  |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
|                                                   | X1    | X2    | X3    | Y     |  |
| X1                                                | 0.796 |       |       |       |  |
| X2                                                | 0.700 | 0.770 |       |       |  |
| X3                                                | 0.615 | 0.767 | 0.820 |       |  |
| Y                                                 | 0.845 | 0.864 | 0.739 | 0.836 |  |

d. Cross Loading

| Discriminant validity - Cross loadings |       |       |       |       |  |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
|                                        | X1    | X2    | X3    | Y     |  |
| X1.1                                   | 0.856 | 0.459 | 0.544 | 0.645 |  |
| X1.10                                  | 0.863 | 0.682 | 0.598 | 0.842 |  |
| X1.2                                   | 0.731 | 0.467 | 0.380 | 0.537 |  |
| X1.3                                   | 0.767 | 0.467 | 0.342 | 0.639 |  |
| X1.4                                   | 0.795 | 0.634 | 0.563 | 0.675 |  |
| X1.5                                   | 0.841 | 0.619 | 0.572 | 0.735 |  |
| X1.6                                   | 0.739 | 0.562 | 0.417 | 0.663 |  |
| X1.7                                   | 0.761 | 0.534 | 0.437 | 0.606 |  |
| X1.8                                   | 0.791 | 0.511 | 0.429 | 0.609 |  |
| X1.9                                   | 0.805 | 0.585 | 0.552 | 0.705 |  |
| X2.1                                   | 0.506 | 0.760 | 0.515 | 0.555 |  |
| X2.10                                  | 0.607 | 0.792 | 0.592 | 0.654 |  |
| X2.2                                   | 0.524 | 0.758 | 0.642 | 0.696 |  |
| X2.3                                   | 0.597 | 0.797 | 0.540 | 0.610 |  |
| X2.4                                   | 0.540 | 0.799 | 0.666 | 0.661 |  |
| X2.5                                   | 0.617 | 0.765 | 0.588 | 0.773 |  |
| X2.6                                   | 0.491 | 0.761 | 0.592 | 0.670 |  |
| X2.7                                   | 0.418 | 0.755 | 0.539 | 0.634 |  |
| X2.8                                   | 0.524 | 0.775 | 0.698 | 0.631 |  |
| X2.9                                   | 0.545 | 0.737 | 0.521 | 0.712 |  |
| X3.1                                   | 0.346 | 0.670 | 0.736 | 0.465 |  |
| X3.2                                   | 0.664 | 0.677 | 0.879 | 0.757 |  |
| X3.3                                   | 0.421 | 0.618 | 0.860 | 0.567 |  |
| X3.4                                   | 0.674 | 0.856 | 0.847 | 0.754 |  |
| X3.5                                   | 0.509 | 0.522 | 0.799 | 0.572 |  |
| X3.6                                   | 0.476 | 0.494 | 0.801 | 0.530 |  |
| X3.7                                   | 0.410 | 0.550 | 0.774 | 0.503 |  |
| X3.8                                   | 0.412 | 0.578 | 0.853 | 0.586 |  |
| Y1.1                                   | 0.761 | 0.660 | 0.577 | 0.855 |  |
| Y1.2                                   | 0.714 | 0.672 | 0.516 | 0.851 |  |
| Y1.3                                   | 0.648 | 0.628 | 0.682 | 0.827 |  |
| Y1.4                                   | 0.699 | 0.639 | 0.389 | 0.727 |  |
| Y1.5                                   | 0.754 | 0.867 | 0.689 | 0.851 |  |
| Y1.6                                   | 0.616 | 0.899 | 0.693 | 0.861 |  |
| Y1.7                                   | 0.685 | 0.809 | 0.747 | 0.848 |  |
| Y1.8                                   | 0.795 | 0.633 | 0.568 | 0.892 |  |
| Y1.9                                   | 0.689 | 0.637 | 0.661 | 0.804 |  |

## 2. OUTPUT INNER MODEL

### a. R-Square

| R-square - Overview |          |                   |  |
|---------------------|----------|-------------------|--|
|                     | R-square | R-square adjusted |  |
| <b>Y</b>            | 0.863    | 0.852             |  |

### b. F-Square

| f-square - Matrix |    |    |    |       |  |
|-------------------|----|----|----|-------|--|
|                   | X1 | X2 | X3 | Y     |  |
| <b>X1</b>         |    |    |    | 0.754 |  |
| <b>X2</b>         |    |    |    | 0.525 |  |
| <b>X3</b>         |    |    |    | 0.028 |  |
| <b>Y</b>          |    |    |    |       |  |

### c. Pengujian Signifikansi (Pengaruh Langsung / Dirrect Effect)

| Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values |                     |                 |                            |                          |          | Copy to Excel/Word | Copy to R |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|----------|--------------------|-----------|
|                                                     | Original sample (O) | Sample mean (M) | Standard deviation (STDEV) | T statistics ( O/STDEV ) | P values |                    |           |
| <b>X1 -&gt; Y</b>                                   | 0.457               | 0.449           | 0.124                      | 3.682                    | 0.000    |                    |           |
| <b>X2 -&gt; Y</b>                                   | 0.468               | 0.469           | 0.126                      | 3.720                    | 0.000    |                    |           |
| <b>X3 -&gt; Y</b>                                   | 0.098               | 0.108           | 0.109                      | 0.900                    | 0.368    |                    |           |
|                                                     |                     |                 |                            |                          |          |                    |           |
|                                                     |                     |                 |                            |                          |          |                    |           |



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/16/11/2023

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 16/11/2023

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ANJLIA D NASUTION  
NPM : 2005170103  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

**Identifikasi Masalah :** Meningkatnya kasus fraud di Indonesia, seperti korupsi, penipuan dan pencurian, penyalahgunaan wewenang, kecurangan dan pelanggaran hukum yang berdampak pada kerugian dan kebangkrutan. Adanya karyawan yang masih ragu dalam melakukan tindakan whistleblowing karena kurangnya kesadaran dan niatan dalam menentukan tindakan whistleblowing. Adanya akuntan, karyawan, auditor internal yang kurang memiliki kesadaran dalam menerapkan whistleblowing dan kurang mendapat dukungan normatif dari lingkungan sekitarnya. Adanya whistleblower (orang yang melaporkan kecurangan) takut mendapat tindakan balas dendam karena kurangnya perlindungan hukum bagi pelapor

**Rencana Judul :**

1. Pengaruh subjectiv Norm, kontrol perilaku, attitude toward dan perceived behavioral control terhadap niat mahasiswa untuk menjadi whistleblower
2. Analisis hukum, efektivitas sistem pengendalian intern dan etika whistleblower dalam konteks kecurangan akuntansi: studi perbandingan whistleblowing di perusahaan publik dan swasta
3. Pengaruh audit internal, good corporate governance dan norma subjektif terhadap efektivitas whistleblowing system

**Objek/Lokasi Penelitian :** UMSU dan perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di BEI

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya Pemohon

(ANJLIA D NASUTION)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/16/11/2023

Nama Mahasiswa : ANJLIA D NASUTION  
NPM : 2005170103  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan  
Tanggal Pengajuan Judul : 16/11/2023  
Nama Dosen pembimbing : Henny Zurika Lubis, SE., M.Si (11 Desember 2023)

Judul Disetujui\*\*

Pengaruh Penerapan Internal Good Corporate Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

( Dr. Zafira Hanum, S.E., M.Si. )

Medan, 6 Juni 2024

Dosen Pembimbing

(Henny zurika Lubis...)

Keterangan  
\*) Diterima oleh Pimpinan Program Studi  
\*\*) Diterima oleh Dosen Pembimbing  
setelah disahkan oleh Prode dan Dosen Pembimbing, scan foto dan upload di sistem ke-2 m pada form online "Upload pengajuan judul Skripsi"



**UMSU**  
Inglis / Cerdas / Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 93/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Beari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**NOMOR : 2298/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2024**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 06 Juni 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Anjlia D Nasution  
N P M : 2005170103  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pengendalian Internal, Good Corporate Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Dosen Pembimbing : Henny Zurika Lubis, SE., M.Si

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 04 September 2025**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 30 Shafar 1446 H  
04 September 2024 M



Dekan  
**Dr. H. Jauhari, SE., MM., M.Si., CMA**  
NIDN : 0109086502



**Tembusan :**

1. Peringgal



# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 02 September 2024



Kepada Yth.  
Bapak/Dekan  
Fakultas Ekonomi  
Uth. Muhammadiyah Sumatera Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : ANJLIA D NASUTION  
 NIM : 2005170103  
 Tempat/Tgl Lahir : SIDEMPURAN, 16 SEPTEMBER  
 Tahun Studi : 2002  
 Jurusan Studi : Akuntansi  
 Alamat Mahasiswa : JL. BUKIT BARISAN 1 NO 12  
 Kecamatan : KEC. MEDAN TIMUR  
 Kota Penelitian : INSPEKTORAT PROVINSI  
 Daerah Penelitian : SUMATERA UTARA  
 Nama Orang Tua : JL KH WAHID HASYIM NO 8

Sehubungan dengan permohonan izin penelitian kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan informasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Sebagai lampiran syarat-syarat lain :

1. Lembar SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Diketahui :

Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam

Pemohon

Anjlia D Nasution



**UMSU**  
Ingat! Cerdas! Terpercaya!

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6621003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

Nomor : 2298/IL3-AU/UMSU-05/F/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 30 Shafar 1446 H

04 September 2024 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
Inspektorat Provinsi Sumatera Utara  
Jln. KH Wahid Hasyim No 8 Medan  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Anjlia D Nasution  
Npm : 2005170103  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pengendalian Internal, Good Corporate Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA  
NIDN : 0109086502





## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA INSPEKTORAT

Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20154  
Telepon (061) 4150461– 4524309, Faksimile (061) 4150194  
Pos-el [inspektorat@sumutprov.go.id](mailto:inspektorat@sumutprov.go.id), Laman [inspektorat.sumutprov.go.id/](http://inspektorat.sumutprov.go.id/)

Medan, 11 September 2024

Nomor : 000-9.2/3285/ITPROVSU  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Persetujuan Riset  
Pendahuluan

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di  
Medan

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 2298/II.3-AU/UMSU-05/F/2024  
Tanggal 4 September 2024 Perihal Izin Riset Pendahuluan, dengan ini disampaikan:

1. Mahasiswa Politeknik MBP yang melakukan riset yaitu:

Nama : Anjilia D Nasution  
NPM : 2005170103  
Prodi : Akuntansi  
Judul : Pengaruh Pengendalian Internal, Good Corporate Governance dan Whistleblowing System terhadap pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Inspektorat Provsu

2. Berkenaan dengan angka 1 di atas, dengan ini menyetujui riset pendahuluan di lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR  
LASRO MARBUN  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641201198701 1 002





## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA INSPEKTORAT

Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20154

Telepon (061) 4150461 – 4524309, Faksimile (061) 4150194

Pos-el [inspektorat@provinsisumutprov.go.id](mailto:inspektorat@provinsisumutprov.go.id), Laman [inspektorat.sumutprov.go.id/](http://inspektorat.sumutprov.go.id/)

Medan, 04 Desember 2024

Nomor : 000.9.2/4348/ITPROVSU  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : -  
Perihal : Selesai Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di  
Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 3076/II.3-AU/UMSU-05/F/20244 Tanggal 19 November 2024 Hal MenyeselsRiset, dengan ini disampaikan:

1. Permohonan izin riset mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara:

Nama : Anjilia D Nasution  
NPM : 2005170103  
Jurusan : Akuntansi  
Judul : Pengaruh Pengendalian Internal, Good Corporate Governance dan Whistleblowing System Pencegahan Kekurangan (Fraud) pada Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

2. Berkenaan dengan angka 1 di atas, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu surat selesai pelaksanaan riset mahasiswa di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mulditar Basri No. 3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474



**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : ANJLIA D. NASUTION  
NPM : 2005170103  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : PEMERIKSAAN  
Nama Dosen Pembimbing : HENNY ZURIKA LUBIS, SE., M.Si  
Judul : PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, GOOD  
CORPORATE GOVERNANCE DAN WHISTLEBLOWING  
SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN  
(FRAUD) DI INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA  
UTARA

| Item                               | Hasil Evaluasi                                                                                           | Tanggal  | Paraf |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| BAB I                              | - Latar Belakang Masalah, deskripsi<br>dan letak<br>- Identifikasi Masalah penelitian                    | 6/6 '24  |       |
| BAB II                             | - Teori dalam Bab I ditambah dari<br>berbagai artikel jurnal, buku dll<br>- Kerangka berpikir diperbaiki |          |       |
| BAB III                            | - Teknik Analisis data gunakan SEM.<br>Pls<br>- Definisi operasional perbaikan                           | 10/6 '24 |       |
| Daftar<br>Pustaka                  | - Cusikan Menelaing                                                                                      |          |       |
| Persetujuan<br>Seminar<br>Proposal | - Ace. seminar proposal                                                                                  | 21/6 '24 |       |

Medan,

Disetujui Oleh:  
Dosen Pembimbing

**HENNY ZURIKA LUBIS S.E., M.Si**

Diketahui Oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

**Assoc. Prof. Dr. ZULFA HANUM S.E., M.Si**



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



### PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 09 Oktober 2024 menerangkan bahwa:

Nama : Anjlia D Nasution  
NPM : 2005170103  
Tempat / Tgl.Lahir : Sidempuan, 16 September 2002  
Alamat Rumah : Jln. Bukit Barisan I, Gg Bunga No. 12 Medan  
Judul Proposal : Pengaruh Pengendalian Internal, Good Corporate Governance dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : Henny Zurika Lubis, S.E., M.Si

Medan, 09 Oktober 2024

### TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Harim, S.E., M.Si

Pembimbing

Henny Zurika Lubis, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pemanding

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

19/10/2024

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si  
NIDN : 0105087601



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Rabu, 09 Oktober 2024* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Anjlla D Nasution*  
NPM. : *2005170103*  
Tempat / Tgl.Lahir : *Sidempuan, 16 September 2002*  
Alamat Rumah : *Jln. Bukit Barisan 1, Gg Bunga No. 12 Medan*  
Judul Proposal : *Pengaruh Pengendalian Internal, Good Corporate Governance dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara*

Disetujui / tidak disetujui \*)

| Item       | Komentar                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Judul      | .....                                                                  |
| Bab I      | <i>Fenomena masalah</i> .....                                          |
| Bab II     | <i>Kerangka konseptual</i> .....                                       |
| Bab III    | <i>populasi &amp; sampel</i> .....                                     |
| Lainnya    | <i>Sistematisasi formulasi metode penelitian</i> .....                 |
| Kesimpulan | <input type="checkbox"/> Lulus<br><input type="checkbox"/> Tidak Lulus |

Medan, 09 Oktober 2024

**TIM SEMINAR**

Ketua

*[Signature]*  
Assoc. Prof. Dr. *Zulia Hanum, S.E., M.Si*

Pembimbing

*[Signature]*  
Henny Zurika Lubis, S.E., M.Si

Sekretaris

*[Signature]*  
Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembanding

*[Signature]*  
Dr. Eka Nurmali Sari, S.E., M.Si., Ak., CA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. DATA PRIBADI

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nama                  | : Anjlia D. Nasution                                                     |
| NPM                   | : 2005170103                                                             |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Sidempuan, 16 September 2002                                           |
| Jenis Kelamin         | : Perempuan                                                              |
| Agama                 | : Islam                                                                  |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia                                                              |
| Anak Ke               | : 2 dari 2 bersaudara                                                    |
| Alamat                | : Jl. Desa Tung-Tung Batu, Kec. Silima Pungga-pungga, Kab. Dairi         |
| No. Telephone         | : 082364950609                                                           |
| Email                 | : <a href="mailto:anjlianasution@gmail.com">anjlianasution@gmail.com</a> |

### 2. DATA ORANG TUA

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nama Ayah     | : Alm. Marasutan Nasution                                              |
| Pekerjaan     | : -                                                                    |
| Nama Ibu      | : Basariah Cibro                                                       |
| Pekerjaan     | : Wiraswasta                                                           |
| Alamat        | : Jl. Desa Tung-Tung Batu, Kec. Silima Pungga-pungga, Kab. Dairi       |
| No. Telephone | : 081370179464                                                         |
| Email         | : <a href="mailto:basariahcibro@yahoo.com">basariahcibro@yahoo.com</a> |

### 3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Sekolah Dasar                    | : SD Negeri 030392 Parongil               |
| Sekolah Menengah Tingkat Pertama | : SMP N 1 Silima Pungga-pungga            |
| Sekolah Menengah Tingkat Atas    | : SMA N 1 Silima Pungga-pungga            |
| Perguruan Tinggi                 | : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |

